

**ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN
POTENSI EKONOMI PESISIR DIPANTAI BARAT**
(Studi Kasus: Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : TAPRIADI
NPM : 1705180012
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : TAPRIADI
NPM : 1705180012
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN POTENSI EKONOMI PESISIR DIPANTAI BARAT (STUDI KASUS:KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si)

Penguji II

(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Pembimbing

(Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : TAPRIADI
N.P.M : 1705180012
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBLIJAKAN DANA DESA DAN
POTENSI EKONOMI PESISIR DI PANTAI BARAT
(STUDI KASUS KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, 18 September 2021

Pembimbing Skripsi

Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **TAPRIADI**

NPM : 1705180012

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi & Bisnis

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul "ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN POTENSI EKONOMI PESISIR DIPANTAI BARAT (STUDI KASUS: KEC. MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NBATAL" adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



TAPRIADI

ABSTRAK

Dalam Skripsi ini, penulis mengangkat judul “Analisis Evaluasi Kebijakan Dana Desa dan Potensi Ekonomi Pesisir Dipantai Barat (Studi Kasus: Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan dana desa beserta menganalisa potensi ekonomi dipantai barat paska kebijakan dana desa di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan teknik analisis deskriptif. Dengan paska kebijakan anggaran dana desa melihat perkembangan potensi ekonomi desa dari beberapa sector dengan targetan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan secara pendapatan ekonomi masyarakat desa dan juga pendapatan asli desa. Dalam hal potensi ekonomi desa ini ditiga desa diantaranya desa singkuang 1 memiliki BUMDes dengan jenis keyboard, singkuang 2 memiliki BUMDes dengan jenis tambak lele, dan sikapas dengan BUMDes yaitu pemeliharaan sapid terakhir potensi ekonomi desa sikapas pembangunan infrastruktur pasas desa. Tidak jahu berbeda dengan hal potensi ekonomi desa, hal ini yaitu mengevaluasi dana desa mulai dari asas- asas pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, format APBDes, Perencanaan APBDes, Pelaksanaan pencairan dalam APBDes, Penatausahaan APBDes, Pelaporan dan pertanggungjawaban, dan Pendampingan Desa yang secara praturan pemerintahan pusat dan juga membandingkan penerapan praturan pemerintahan desa di kecamatan muara batang gadis kabupaten madina.

Kata kunci: *Dana Desa, Potensi Ekonomi Desa, Praturan Pemerintahan Pusat dan Penerapan praturan pemerintahan desa tentang pengelolaan Keuangan Desa.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas nikmat kesehatan, kesempatan, dan diberikan-Nya kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Shalawat beriring salam tak lupa penulis hadiahkan pada jungjunan Rasulullah Muhammad SAW, semoga syafaat beliau tercurah bagi penulis dan pembaca sekalian.

Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis sebagai seorang mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Selain itu, penulis juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun judul penelitian yang penulis buat yaitu : **“Analisis Evaluasi Kebijakan Dana Desa Dan Potensi Ekonomi Pesisir Dipantai Barat (Studi Kasus: Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)** Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, dan juga semangat dari berbagai pihak yang ada sehingga dapat membuat penulis Semangat, tekun, dan giat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima

kasih yang sebesar- besarnya atas jasa dan segalanya yang telah diberikan berbagai pihak tersebut terutama kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orangtua, penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada Ayahanda Mauluddin Nasution dan Ibunda Siti Khodijah Nasution serta ketiga adik penulis yaitu K a h i r u l r o z i k i n N a s u t i o n , R i a n A r d i N a s u t i o n dan Aan Ardi Nasution yang penulis sayangi dan cintai yang telah memberikan dukungan moril, materil dan spiritual yang tiada terhingga kepada penulis dan juga seluruh kasih sayang yang diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri., S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS., S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Lailan Safina. M.Si. yang selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta seluruh staff selaku pihak – pihak yang telah memberikan segudang ilmu, pengetahuan, pengalaman yang dipunya kepada penulis pada saat menjalani kegiatan perkuliahan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai;
8. Kepada seluruh sahabat Mahasiswa Kelas A Pagi Ekonomi Pembangunan angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
9. Seluruh pihak yang terlibat dan membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwasanya didalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati memohon kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis agar kedepannya penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, atas segala bimbingan, bantuan, motivasi dan seluruh yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan sebagaimana mestinya. Penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak

tersebut dan berdo'a kepada Allah SWT dan memberikan shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala sesuatu yang diberikan tersebut diberikan imbalan pahala dan juga dimudahkan segala rezeki serta urusannya. Pada akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan berharap semoga penulisan skripsi ini dapat penulis lanjutkan hingga akhirnya selesai dan memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Amin.....

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 Oktober 2021

Penulis

TAPRIADI

NPM : 1705180012

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	25
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah	26
1.3.1 Batasan Masalah	26
1.3.2 Rumusan Masalah	26
1.4 Tujuan Penelitian	26
1.5 Manfaat Penelitian	27
1.5.1 Manfaat Akademik	27
1.5.2 Manfaat Non-Akademik	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	28

2.2 Pembangunan Ekonomi	43
2.3 Pengeluaran Pemerintah	53
2.4 Kebijakan Dana Desa	60
2.5 Penelitian Terdahulu	65
2.6 Tahapan Penelitihan	67
2.6.1 Kerangka Analisis Penelitian	67
BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1 Pendekatan Penelitian	68
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	68
3.2.1 Tempat Penelitian	68
3.2.2 Waktu Penelitian	68
3.3 Jenis dan Sumber Data	69
3.3.1 Jenis Data	69
3.3.2 Sumber Data	69
3.4 Teknik Pengumpulan Data	69
3.5 Teknik Analisis Data	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	70

4.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Mandailing Natal.....	70
4.1.2 Perkembangan Wilayah Mandailing Natal.....	73
4.1.3 Kondisi Demografi	75
4.1.4 Keadaan Ekonomi.....	79
4.1.5 Keadaan Sosial	81
4.2 Kondisi Geografi Kecamatan Muara Batang Gadis	87
4.2.1 Luas Wilayah.....	88
4.2.2 Tingkat Kependudukan.....	89
4.2.3 Tingkat Pendidikan.....	90
4.2.4. Tingkat Perekonomian.....	92
4.3 Perkembangan potensi ekonomi Desa di wilayah pesisir Kecamatan Muara Batang Gadis (Singkuang I, Singkuang II, dan Sikapas) paska kebijakan dana desa.	93
4.4 Pengelolaan dana desa berdasarkan pada peraturan dari Pemerintah pusat secara optimal di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina.	102
4.4.1 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa.	102
4.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	105

4.4.3 Perencanaan APBDesa.	109
4.4.3.1 Peraturan Pemerintahan Pusat.....	109
4.4.3.2 Peraturan yang di Terapkan Pemerintahan Desa di Kecamatan Muara Batang Gadis.....	110
4.4.4 Pelaporan dan Pertanggungjwban Pelaksanaan APBDes.....	112
4.4.4.1 Praturan pusat.....	112
4.4.4.2 Peraturan yang di Terapkan Pemerintahan Desa di Kecamatan Muara Batang Gadis.....	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Negara Lain Pada Kuartal II ke Kuartal III Tahun 2020.....	3
Tabel. 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Secara Tahunan dan Kuartal	4
Tabel 1.3 Dana Desa Provinsi Tahun 2018-2020	18
Tabel 1.4 Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020	21
Tabel 1.5 Dana Desa Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018-2020	24
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	65
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016	71
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Madina Tahun 2015 – 2017	76
Tabel 4.3 Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2019 – 2020	78
Tabel. 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Mandailing Natal tahun 2018- 2020	80
Tabel. 4.5 Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020	82

Tabel. 4.6 Jumlah Tenaga Kesehatan di Mandailing Natal	85
Tabel 4.7 Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Luas Kecamatan	
Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2019	88
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut	
Desa Tahun 2019	89
Tabel 4.9 Banyaknya Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Menurut	
Desa/Kelurahan Tahun Ajaran 2019/2020	91
Tabel 4.10 Banyaknya Unit Usaha/Perusahaan Perdagangan Menurut	
Jenis Usaha dan Desa/Kelurahan Tahun 2019	92
Tabel 4.11 Potensi Ekonomi Desa Singkuang I, Singkuang II,dan	
Sikapas Paska Kebijakan Dana Desa	94
Tabel 4.12 Anggaran Dana Desa Singkuang I, Singkuang I, dan	
Sikapas Tahun 2019 dan 2020	96
Tabel 4.13 Program Dana Desa Dalam Bentuk Pisik Tahun 2019 dan 2020	99
Tabel 4.14 Perbandingan Peraturan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan	
Desa Penegelolaan Dana Desa	103
Tabel 4.15 Perbandingan Peraturan Pemerintahan Pusat dan PemDesa di	
Kecamatan MBG Ttg Pengelolaan Keuangan Desa	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2 Tingkat Korupsi Tertinggi Tahun 2020	15
Gambar 1.2 Rata-Rata Keseluruhan Dana Desa Tahun 2015-2021	17
Gambar 1.3 Dana Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020	20
Gambar 1.4 Dana Desa Kabupaten Madina Tahun 2017-2020	23
Gambar 2.1 Peran Pengaruh GNP Terhadap Aktifitas Perekonomian	43
Gambar 2.2 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	55
Gambar 2.3 Kurva Peacock dan Wiseman	56
Gambar 2.4 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave	57
Gambar 2.5 Kerangka Analisis Penelitian	67
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Mandailing Natal	70
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Muara Batang Gadis	87
Gambar 4.3 Peraturan Pemerintahan Pusat Perencanaan APBDesa	109
Gambar 4.4 Peraturan Pemerintahan Desa dalam Perencanaan APBDesa di Kecamatan Muara Baatang Gadis	110
Gambar 4.5 Peraturan Pemerintahan Pusat Tentang Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes	112
Gambar 4.6 Peraturan Pemerintahan Desa Tentang Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara berkembang di Asia Tenggara yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini giat membangun baik dari sektor ekonomi, pengadaan infrastruktur maupun pembangunan Sumberdaya Manusia. Sejak tahun 1998 dan 2008 dengan tingginya nilai inflasi di Negara Indonesia menyebabkan perekonomian Negara Indonesia mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Mulai dari tahun 1998 Negara Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai sektor, khususnya ialah sektor ekonomi dan sektor pembangunan infrastruktur.

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan Kesejahteraan Umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan dimaksud agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari bidang ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yaitu tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam pengertian secara tradisional, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan

sistem sosial secara total sesuai dengan kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok- kelompok sosial dalam sistem itu (Todaro & Smith, 2011).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia semenjak dua abad belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. (Todaro & Smith, 2011)

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Negara dapat dikatakan sejahtera jika output perkapita meningkat. Dalam literatur ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB per kapita. Makin tinggi PDB per kapita, makin sejahtera masyarakat. Agar PDB per kapita terus meningkat maka perekonomian harus terus tumbuh dan harus lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan penduduk.

Tabel. 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Negara Lain

Pada Kuartal II ke Kuartal III Tahun 2020

No	Negara	Kuartal II	Kuartal III
1	Tiongkok	1%	1,9%
2	Indonesia	-0,3%	-1,5%
3	Amerika Serikat	-8%	-4,3%
4	Korea Selatan	-2,1%	-1,9%
5	Jepang	-5,8%	-5,3%
6	Brazil	-9,1%	-5,8%
7	Malaysia	-3,8%	-6%
8	Jerman	-7,8%	-6%
9	Kanada	-8,4%	-7,1%
10	Tahiland	-7,7%	-7,1%
11	Filipina	-3,6%	-8,3%
12	Inggris	-10,3%	-9,8%
13	Prancis	-12,8%	-9,8%
14	India	-4,5%	-10,3%
15	Italia	-12,8%	-10,6%
16	Spanyol	-12,8%	-12,8%

Sumber: Dana Moneter Internasional (IMF)

Pada Tabel 1.1 menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan beberapa negara lain, dengan data yang dirilis oleh lembaga organisasi dunia yaitu Dana Moneter Internasional (IMF). Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Kuartal II pada bulan Juni sebesar (-5,2%), dengan anjlok pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini beberapa negara dunia saling membenahi perekonomian nasional yang semakin terpuruk akibat dari wabah COVID-19 yang melanda dunia akhir-akhir ini tidak terkecuali negara Indonesia. Di bulan Oktober tepat pada Kuartal III

ekonomi dunia mulai membaik sebesar (-4,4%) jika dibandingkan pada kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF) pada kedua kuartal tersebut seperti pada data diatas negara Tiongkok yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik sebesar (1,9%) jika dibandingkan dengan negara lain yang mengalami keminusan dalam pertumbuhan ekonomi, dilanjutkan oleh negara Korea Selatan yang sebesar (-1,9%).

Meski begitu, perekonomian Indonesia justru diperkirakan mengalami kontraksi lebih dalam, yakni dari -0,3% pada Juni menjadi -1,5% pada Oktober. Sejumlah negara lain juga memiliki proyeksi serupa. Mereka adalah Malaysia (-6%), Filipina (-8,3%), dan India (-10,3%).

Tabel. 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Secara

Tahunan dan Kuartal

No	Pertumbuhan Ekonomi	Y-on-Y	Q-to-Q
1.	Q1 2019	5,07%	-0,52%
2.	Q2 2019	5,05%	4,20%
3.	Q3 2019	5,02%	3,06%
4.	Q4 2019	4,97%	-1,74%
5.	Q1 2020	2,97%	-2,41%
6.	Q2 2020	-5,32%	-4,19%
7.	Q3 2020	-3,49%	5,05%
8.	Q4 2020	-2,19%	-0,42%
9.	Q1 2021	-0,74%	-0,96%
10.	Q2 2021	7,07%	3,31%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tiga tahun terakhir ini pertumbuhan perkonomian indonesia mengalami kontraksi sejak awal tahun 2019 tepatnya pada kuartal I dengan jumlah sebesar (5,07% Y-on-Y) begitu juga secara hitungan perkuartal sebesar (-0,52% Q-to-Q), ekonomi nasional terus mengalami penurunan pertumbuhan di tahun selanjutnya lebih besar lagi tepatnya di kuartal II tahun 2020 sebesar (-5,32% Y-on-Y) dan hitungan kuartal sebesar (-4,19% Q-to-Q) dan dilanjutkan pada tahun 2021 tepat di kuartal II pertumbuhan ekonomi indonesia mulai membaik dengan pertumbuhan ekonomi sebesar (7,07% Y-on-Y) begitu juga hitungan pertumbuhan ekonomi secara kuartal dengan sebesar (3,31% Q-to-Q).

Desa Merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 ini, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM), namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. Tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya Indonesia mengucurkan Dana Desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Tujuan Dana Desa:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik Didesa,
2. Mengentaskan Kemiskinan,
3. Memajukan Perekonomian Desa,
4. Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antardesa , Serta
5. Memperkuat Masyarakat Desa Sebagai Subjek dari Pembangunan.

Penetapan kebijakan Dana Desa ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak yang mendukung kebijakan ini merasa bahwa wilayah perdesaan selalu menjadi wilayah yang terpinggirkan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan alokasi dana untuk pembangunan desa. Dengan adanya Dana Desa, pembangunan desa dapat dijalankan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu mengangkat daerah yang sifatnya susah untuk berkembang sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. (www.kemendes.go.id).

Sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan yang ditugaskan kepada desa. Undang-undang

Nomor 23 tahun 2014 pasal 371 menyatakan bahwa dalam daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk desa yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Sebagai wilayah pemerintahan daerah, desa melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh daerah dengan beban anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 372 Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai berikut;

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menugaskan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
2. Pendanaan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN
3. Pendanaan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Propinsi dibebankan kepada APBD Provinsi.
4. Pendanaan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan diatas maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan sebagian urusan pembangunan kepada desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks pembangunan daerah baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. Pembangunan desa ditunjukkan untuk sebuah peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa. Dalam pelaksanaa pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera ,dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawali implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan supervise, dan pendampingan (Adisasmita,2006).

Pembangunan desa yang diberikan kewenangan kepada pemerintah desa mencakup pembangunan fisik maupun non fisik yang dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembangunan Desa yang dibiayai melalui Dana Desa, direncanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat desa. Hal ini diatur oleh pemerintah dalam pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
2. Musyawarah desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Semua rencana pembangunan desa harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota. Dengan demikian rencana pembangunan desa tidak boleh bertentangan dengan RPJM dengan tetap mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pemerintahan, pengambilan keputusan untuk kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang ada di desa. Harus ada yang mendampingi atau yang mengawasi kinerja Pemerintah desa, agar bisa berjalan dengan baik dan dalam pengambilan keputusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan harus ada yang mengawasinya agar bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka untuk kewenangan yang dimiliki untuk mengatur kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban

untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan didesa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk, pengawasan yang dilakukan BPD adalah pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, yang diawasi lebih kepada penggunaan APBDes, Swadaya Masyarakat, dan Dana Desa.

Untuk meningkatkan pembagunan yang ada didesa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar roda perekonomian didesa bisa berjalan dengan baik maka Pemerintah memberikan bantuan kepada setiap desa yang ada di Indonesia lewat pemberian Dana Desa. Dana desa adalah dana yang berasal dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembagunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara pasal 1 (2). selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut di transfer melauai APBD kabupaten untuk selanjutnya di transfer ke APBDes. Penyaluran Dana Desa di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Tahapan Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran yang berjalan dengan ketentuan :

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%,

3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD di harapkan tidak ragu dan takut karena BPD memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan dana desa yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa yang memuat paling sedikit pelaksanaan peraturan desa dan laporan inilah yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014).

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, merupakan Nawacita ketiga yang salah satu agendanya mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Rendahnya peranserta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan menyebabkan masyarakat desa semata-mata diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan. Alhasil partisipasi yang ada masih sebatas pada *output* atau pemanfaatan hasil. Secara umum banyak potensi alam di desa yang masih dikelola secara subsisten, sebagai dampak ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Di sinilah peran pendamping

desa menjadi strategis dalam mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri yang mampu bertindak selaku subjek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan pendampingan desa meliputi

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
4. Mengoptimalkan asset lokal desa secara emansipatoris.

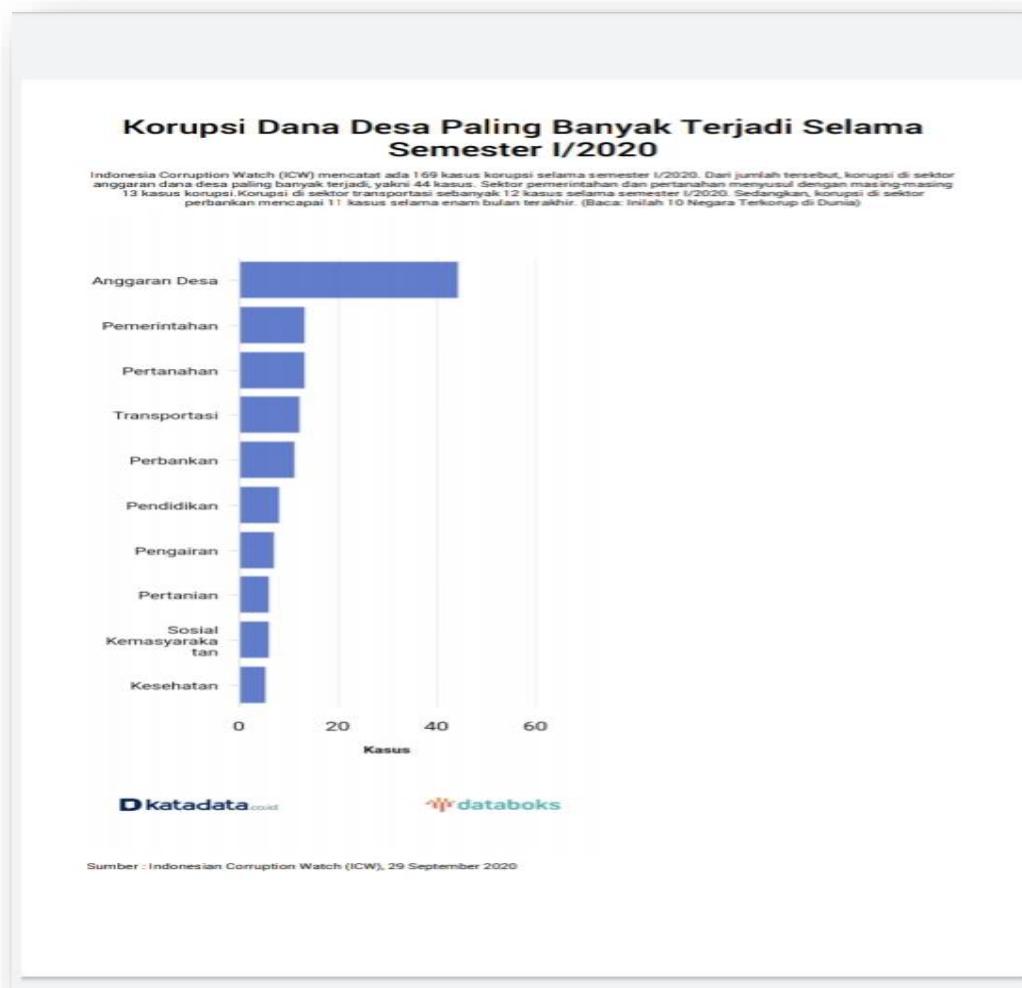
Oleh karena itu, kehadiran pendamping desa diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa sekaligus pelestarian hasil-hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendampingan ini desa diharapkan dapat menggali sumber-sumber daya yang dimiliki desa dalam mewujudkan desa mandiri.(www.bappenas.go.id).

Kebijakan besar yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi untuk mencari desa fiktif tambahan yang kemungkinan ikut menerima dana desa. Proses pemeriksaan lanjutan ini sesuai dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kita terus melakukan penelitian dan verifikasi, kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam temu media di Jakarta.’

Ketentuan terbaru itu, telah mengatur kewajiban kepala daerah untuk melakukan verifikasi kembali jumlah desa guna menghindari adanya perbedaan data dan desa fiktif. Jadi ada *check and balance*, ini sebagai koordinasi apabila ada perbedaan. data registrasi desa yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya data desa yang didapatkan daerah, kita bisa melihat kalau ada perbedaan (jumlah) desa. Sebelumnya, terdapat dugaan kasus penyaluran dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan karena dana tersebut disalurkan kepada 56 desa fiktif atau desa yang memiliki nama tapi tidak berpenghuni.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penyaluran dana desa untuk 56 desa fiktif tersebut, yang diketahui berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, telah dihentikan. Sri Mulyani mengatakan penghentian penyaluran dana desa tersebut dilakukan sampai pihaknya mendapatkan kejelasan atas status desa secara hukum maupun secara substansi fisik. Kasus itu berawal dari pembentukan 56 desa yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Konawe Nomor 7 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan Daerah Konawe Nomor 2 Tahun 2011. Pada akhirnya 56 desa tersebut mendapatkan nomor registrasi desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016 sehingga mulai 2017 desa itu memperoleh alokasi dari pemerintah.(m.republika.co.id).



Gambar 1.1 Tingkat Korupsi Tertinggi Tahun 2020

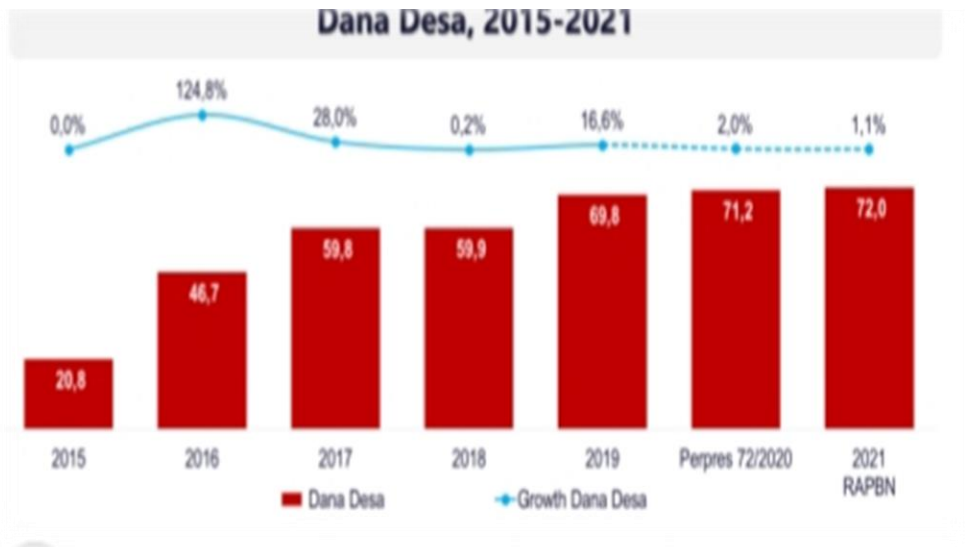
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 169 kasus korupsi selama semester I/2020. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus. Sektor pemerintahan dan pertanahan menyusul dengan masing-masing 13 kasus korupsi. Korupsi di sektor transportasi sebanyak 12 kasus selama semester I/2020. Sedangkan, korupsi di sector perbankan mencapai 11 kasus selama enam bulan terakhir.

Program Membangun Desa Menata Kota dari Anggaran Dana Desa menjadi menjadi proyek baru bagi para Pemerintahan Korup. Melihat data diatas sekarang Korupsi itu tidak lagi bertempat di Pusat Ibu Kota akan tetapi telah

merambah ke pelosok desa terbukti dengan tingginya kasus korupsi Anggaran Dana Desa. Tinggi Korupsi Anggaran Dana Desa diakibatkan oleh beberapa factor antara lain terdapat 53 desa fiktif tersebut. Ini adalah tugas baru bagi Pemerintahan dan Stakeholder lainnya dalam mengawal dan memberantas tingkat korupsi anggaran dana desa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dihadapan anggota DPR/MPR, Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu mengungkapkan, anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp72 triliun. Jumlah itu naik Rp. 2 Triliun dari tahun 2019 yang hanya berkisar Rp 70 triliun. Presiden menyebut kenaikan anggaran dana desa ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desa. Diyakininya kehadiran dana desa dapat mendorong pengembangan kewirausahaan atau entrepreneurship.

Dana Desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Dijelaskannya, jika kewirausahaan ini tumbuh maka produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional. Ia pun menargetkan bahwa produk-produk ini dapat menembus pasar internasional juga e-commerce. (Kemenkeu).



Gambar 1.2 Rata-Rata Keseluruhan Dana Desa Tahun 2015-2021

Sumber: Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Dari data infografis diatas dana desa menunjukkan perkembangan yang pesat mulai dari tahun 2015 dengan jumlah anggaran Rp.20,8 T mengalami peningkatan yang tinggi sebesar 124,8 % pada tahun 2016 dengan jumlah anggaran Rp.46,7 T dilanjutkan ditahun 2017 sebesar 28,0%, jumlah anggaran sebesar Rp.59,8 T. Pada tahun 2018 peningkatan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, adapun peningkatan anggaran tahun ini 0,2% dengan anggaran sebesar Rp. 59,9 T, Ditahun 2019 sebesar 16,6%, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.69,8 T, tahun 2020 sebesar 2,0% dengan jumlah anggaran Rp.71,2 T dan terakhir pada tahun 2021 sebesar 1,1% dengan jumlah anggaran sebesar Rp.72,0 T. Lajur Growth Dana Desa dan Dana Desa. Total keseluruhan Dana Desa selama 7 Tahun terakhir ini sebesar Rp.400,2 Triliun.

Tabel 1.3 Dana Desa Provinsi Tahun 2018-2020

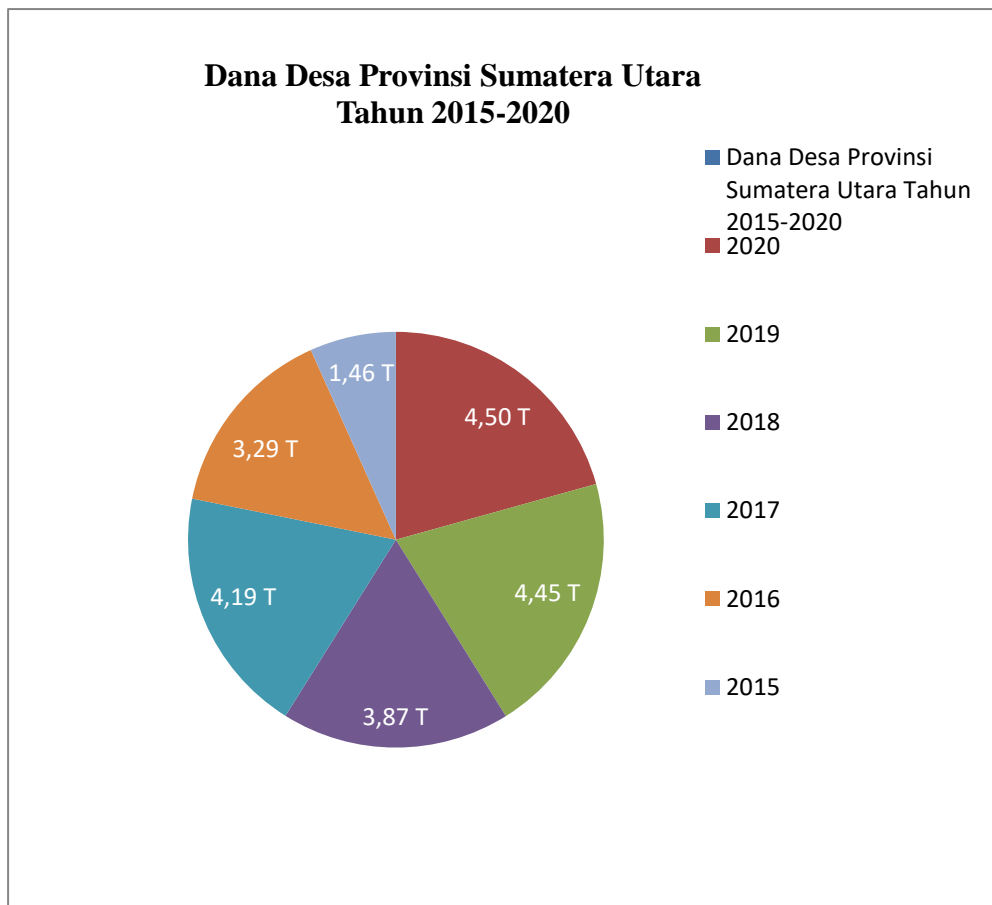
No	Provinsi	Anggaran (Triliun dan Miliar)
1.	Jawa Tengah	22.82 T
2.	Jawa Timur	21.22 T
3.	Jawa Barat	14.97 T
4.	Papua	14.78 T
5.	Aceh	14.46 T
6.	Sumatera Utara	12.82 T
7.	NTT	8.64 T
8.	Sumatera Selatan	7.70 T
9.	Lampung	6.97 T
10.	Sulawesi Selatan	6.60 T
11.	Kalimantan Barat	5.72 T
12.	Sulawesi Tenggara	4.36 T
13.	Papua Barat	4.29 T
14.	Sulawesi Tengah	4.28 T
15.	Kalimantan Selatan	4.18 T
16.	Riau	4.16 T
17.	Kalimantan Tengah	3.80 T
18.	Jambi	3.44 T
19.	NTB	3.39 T
20.	Sulawesi Utara	3.35 T
21.	Banten	3.15 T
22.	Maluku	3.13 T
23.	Bengkulu	3.12 T
24.	Sumatera Barat	2.59 T
25.	Maluku Utara	2.59 T
26.	Kalimantan Timur	2.51 T
27.	Bali	1.81 T
28.	Gorontalo	1.60 T
29.	Sulawesi Barat	1.56 T
30.	Kalimantan Utara	1.33 T
31.	Yogyakarta	1.23 T
32.	Bangka Belitung	896 M
33.	Kepulauan Riau	756 M
34.	DKI Jakarta	-

Sumber: Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Terdapat 34 Provinsi yang ada di Indonesia yang mendapat Anggaran Dana Desa terkecuali DKI Jakarta yang sudah dianggap sebagai Provinsi maju dan Ibu Kota Negara ini, Maka dari itu DKI Jakarta tidak mendapatkan anggaran dana desa sebagai mana seperti tabel diatas. Terlepas dari DKI Jakarta ada 33 Provinsi yang mendapatkan jumlah besar anggaran dana desa diantara Provinsi Jawa

Tengah dengan jumlah anggaran dana desa sebesar Rp.22.82 T disusul oleh Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.21.22 T dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.14.97 T ini adalah provinsi dengan jumlah anggaran dana desa terbesar. Tidak lupa saya menjelaskan jumlah anggaran dana desa yang terkecil yaitu didapatkan oleh Provinsi Yogyakarta dengan jumlah anggaran dana desa sebesar Rp.1.23 T diikuti oleh Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp.896 M dan terakhir Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.756 M. Salah satu Provinsi yang mendapatkan Anggaran Dana Desa yaitu Provinsi Sumatera Utara, setelah menampilkan data dana desa setiap provinsi di Indonesia tidak lupa saya menampilkan data dana desa terkhusus Provinsi Sumatera Utara.

Sumatera Utara atau yang biasa disebut dengan (Sumut) terdapat diposisi ke 6 dalam besarnya pendapatan anggaran dana desa seperti tabel 1.1 yang diatas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam 6 tahun terakhir ini tentang Dana Desa di Provinsi Sumatera Utara. Setiap desa di Provinsi Sumatera Utara mendapat transfer Dana Desa rata-rata sebesar Rp 720,442 juta yang di bagikan secara merata guna di alokasikan sesuai dengan RPJMDes yang berlaku di desa tersebut. Berikut ini perkembangan Dana Desa dari tahun ke tahun di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 1.3 Dana Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020

Sumber: Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Program membangun desa melalui anggaran dana desa ini cukup baik bagi desa yang tertinggal atau berkembang terkhususnya di 5.417 desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dapat dilihat dari diagram diatas yang menunjukkan besarnya anggaran dana desa di Provinsi Sumatera Utara ini dari tahun 2015 awal tahun dana desa mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1,46 T lanjut ditahun berikutnya 2016 mengalami kenaikan anggaran yang signifiakn sebesar Rp. 3,29 T dan tahun 2017 sebesar Rp. 4,19 T namun pada tahun berikutnya tahun 2018 anggaran dana desa Provinsi Sumatera Utara cukup mengalami penurunan dengan anggaran sebesar Rp. 3,87 T disebabkan oleh beberapa factor. Kemudian ditahun

berikut tepatnya pada tahun 2019 anggaran dana desanya mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 4,45 T setelah penurunan ditahun sebelumnya, Terhakhir ditahun 2020 ini anggaran dana desa Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp. 4,50 T. Kesimpulan dari 6 tahun terhakhir dana desa diProvinsi Sumatera Utara dimulai tahun 2015 sampai tahun 2020 ini hanya ditahun 2018 yang mengalami penurunan anggaran dana desa.

Setelah jumlah besarnya Anggaran Dana Desa pada Provinsi Sumatera Utara terdapat juga Anggaran Dana Desa setiap Kabupaten atau Kota. Berikut ini perkembangan anggaran dana desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1.4 Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020

No	Kabupaten / Kota	Anggaran (Triliun dan Miliar)
1.	Kab. Nias Selatan	1.019 T
2.	Kab. Deli Serdang	890 M
3.	Kab. Simalungun	852 M
4.	Kab. Padang Lawas Utara	835 M
5.	Kab. Mandailing Natal	829 M
6.	Kab. Padang Lawas	668 M
7.	Kab. Langkat	595 M
8.	Kab. Karo	571 M
9.	Kab. Tapanuli Utara	542 M
10.	Kab. Serdang Bedagai	535 M
11.	Kab. Nias	510 M
12.	Kab. Toba Samosir	509 M
13.	Kab. Tapanuli Selatan	485 M
14.	Kab. Asahan	423 M
15.	Kab. Tapanuli Tengah	405 M
16.	Kab. Nias Utara	385 M
17.	Kab. Dairi	369 M
18.	Kab. Humbang Hasundutan	355 M
19.	Kab. Batu Bara	345 M
20.	Kab. Nias Barat	324 M
21.	Kab. Samosir	308 M

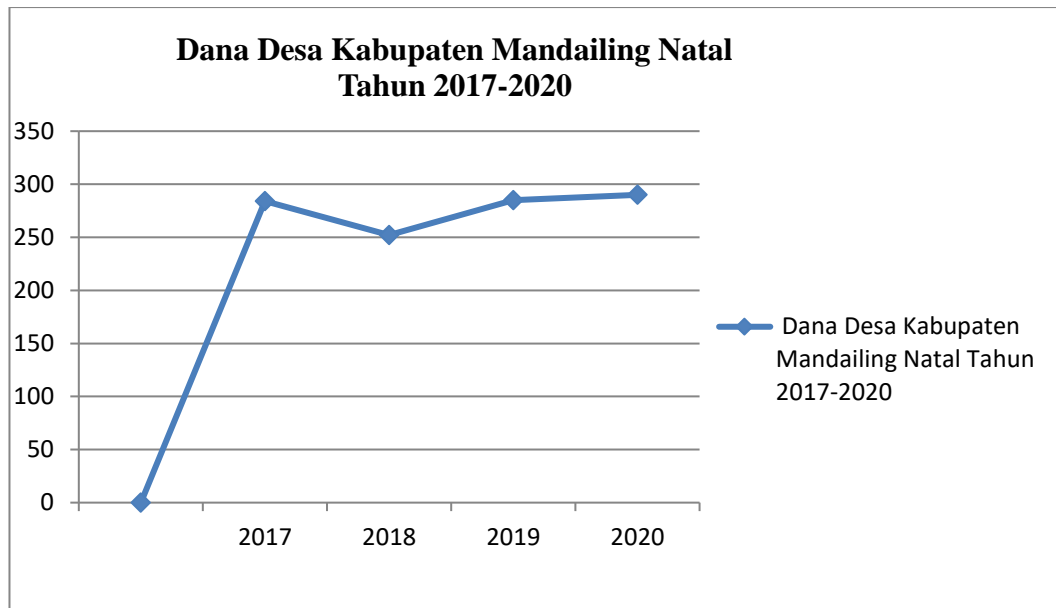
22.	Kota Gunungsitoli	256 M
23.	Kab. Labuhanbatu Utara	230 M
24.	Kab. Labuhanbatu	202 M
25.	Kab. Labuhanbatu Selatan	172 M
26.	Kab. Pakpak Bharat	139 M
27.	Kota Padang Sidempuan	114 M

Sumber: Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan anggaran tahun 2018-2020 dapat kita lihat sebagaimana seperti tabel diatas dengan 27 Kabupaten/Kota yang mendapatkan jumlah anggaran dana desa diantaranya yaitu Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah anggaran dana desa sebesar Rp.1.019 T disusul oleh Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.890 M dan Kabupaten Simalungun sebesar Rp.852 M ini adalah Kabupaten yang madapatkan dana desa terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya berikut ini Kabupaten/Kota yang mendapatkan anggaran dana desa yang terkecil yaitu Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan jumlah anggaran dana desa sebesar Rp.172 M dan diikuti oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp.139 M dan terhakhir Kota Padang Sidimpuan sebesar Rp.114 M. Disamping itu saya juga menandai Kabupaten Mandailing Natal sebagai kelanjutan dari pembahasan isi latar belakang skripsi ini, terdapat Kabupaten Mandailin Natal menempati diposisi yang 5 terbesar dengan jumlah anggaran dana desa sebesar Rp.829 M. Kabupaten Mandailing Natal bisa dikatakan Kabupaten yang belum maju dari segi Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan dll.

Mandailing Natal adalah salah satu Kabupaten yang berada diProvinsi Sumatera Utara yang mendapatkan bantuan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintahan pusat lewat Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara (APBN). Berikut ini jumlah Anggaran Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal dalam 4 tahun terakhir ini.



Gambar 1.4 Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2020

Sumber: Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Anggaran dana desa di Kabupaten Mandailing Natal dalam 4 tahun terakhir ini, dimulai dari tahun 2017 sebesar Rp. 284 M, ditahun 2018 sebesar Rp. 252 M, pada tahun 2019 sebesar Rp, 285 M, dan terakhir data tahun 2020 sebesar Rp. 290 M. Berkaca pada data anggaran dana desa Provinsi Sumatera Utara diatas, diambil kesimpulannya pada data anggaran dana desa Kabupaten Mandailing Natal tidak jauh berbeda sama – sama mengalami penurunan anggaran dana desa ditahun 2018.

Dalam pembahasan anggaran dana desa Kabupaten Mandailing Natal saya juga merincikan anggaran dana desa dalam bentuk lokasi anggaran dana desa pada setiap Kecamatan yang ada diKabupaten Mandailing Natal.

**Tabel 1.5 Dana Desa Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun
2018-2020**

No	Kecamatan	Anggaran (Miliar)
1.	Batang Natal	Rp. 69.936.660.000
2.	Kota Nopan	Rp. 69.636.626.000
3.	Natal	Rp. 64.131.085.000
4.	Siabu	Rp. 55.552.017.000
5.	Panyabungan	Rp. 50.342.745.000
6.	Tambangan	Rp. 42.504.521.000
7.	Linggah Bayu	Rp. 37.307.902.000
8.	Ranto Baek	Rp. 36.441.471.000
9.	Batahan	Rp. 36.272.421.000
10.	Panyabungan Timur	Rp. 33.684.665.000
11.	Sinunukan	Rp. 30.588.155.000
12.	Muara Batang Gadis	Rp. 28.313.893.000
13.	Muara Sipongi	Rp. 24.886.793.000
14.	Bukit Malintang	Rp. 23.757.336.000
15.	Panyabungan Utara	Rp. 23.637.250.000
16.	Huta Bargot	Rp. 22.968.857.000
17.	Ulu pungut	Rp. 22.798.343.000
18.	Puncak Sorik Marapi	Rp. 22.552.509.000
19.	Panyabungan Barat	Rp. 19.218.214.000
20.	Panyabungan Selatan	Rp. 18.709.533.000
21.	Lembah Sorik Marapi	Rp. 15.275.885.000
22.	Pakantang	Rp. 13.914.765.000
23.	Naga Juang	Rp. 9.704.153.000
	JUMLAH	Rp. 722.135.799.000

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Beberapa peneliti salah satunya (Aziz, 2016) menemukan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa, seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia Pemerintahan Desa dan keaktifan dalam berpartisipasi masyarakat desa yang sangat minimal. Pada saat ini Dana Desa tetap menghadapi kendala, kejadian tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan Dana Desa adalah suatu program baru yang memerlukan perbaikan dalam berproses dengan melihat keadaan di lapangan. Kendala

rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia Pemerintahan Daerah, khususnya untuk Pemerintah Desa menyebabkan terlambatnya proses penyaluran Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan penggunaan Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi desa dalam meningkatkan kualitas hidup di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan melihat apakah dengan adanya kebijakan Dana Desa dapat mengembangkan ekonomi desa dalam mendukung kualitas hidup masyarakat desa. Untuk itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Evaluasi Kebijakan Dana Desa dan Potensi Ekonomi Pesisir Dipantai Barat ”(Studi Kasus: Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah antara lain;

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pengelolaan Keuangan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa.
2. Kegagalan Pemerintahan Desa dalam merealisasikan anggaran Dana Desa pada waktu yang telah ditentukan.
3. Tidak ada keterbukaan antara Pemerintahan Desa terhadap Masyarakat dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa secara Transfaransi dan Akuntabilitas.

4. Meningkatnya tindakan Korupsi Dana Desa di Pemerintahan Desa seluruh Indonesia.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang diambil dalam hal ini lebih terfokus pada perkembangan potensi ekonomi di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dari dampak kebijakan dana desa pada tahun 2019-2020.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

1. Bagaimana perkembangan potensi ekonomi Desa di wilayah pesisir Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina paska kebijakan dana desa?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan pada peraturan dari pemerintah pusat secara optimal di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal adalah:

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan potensi ekonomi di desa Singkuang I, Singkuang II dan Sikapas paska kebijakan dana desa?

2. Melakukan evaluasi pengelolaan penggunaan dana desa berdasarkan pada peraturan dari pemerintah pusat secara optimal di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademik

1. Membantu perkembangan ilmu ekonomi terkhususnya ekonomi publik dan ekonomi pembangunan tentang kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam mengetahui peraturan pemerintahan pusat tentang pengelolaan anggaran kebijakan Dana Desa.

1.5.2 Manfaat Non-Akademik

1. Bagi pemerintah Desa di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan kebijakan khususnya Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hollis B. Chenery (Todaro & Smith, 2011), Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi structural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita.

Menurut Prof. Simon Kuznets (Michael Todaro) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Bahwasanya terdapat definisi tersebut mempunyai tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi (*Todaro*). Ketiganya adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan tenaga kerja.
3. Kemajuan teknologi, yang dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (a) kemajuan yang bersifat netral, (b) kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, (c) kemajuan teknologi yang hemat modal.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation* ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.

a. Pertumbuhan output

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

- Sumber daya alam
- Sumber daya manusia
- Stok kapital yang tersedia

Sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun. Tetapi apabila output terusmeningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi (dalam arti pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk) akan berhenti apabila batas atas ini dicapai.

b. Pertumbuhan penduduk

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

2. David Ricardo

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya juga masih tetap sama yaitu bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya mencapai posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu, sumber-sumber alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Perbedaan terutama terletak pada penggunaan alat analisis mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo yang terkenal itu) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian di antara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan. (Kuncoro, 2000).

Proses pertumbuhan yang digambarkan Ricardo ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah tanah, yang sangat susah untuk diperluas, sebagai faktor produksi.
- b. Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah (natural wage).
- c. Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat.
- d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.
- e. Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan.

3. Thomas Robert Malthus

Dalam pandangan mazhab Klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikansi masalah pertambahan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat dari pada suplai makanan. Produksi makanan perkapita, tentu saja akan mengalami penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus berpendapat bahwa tidak menjadi jaminan kalau pertambahan penduduk secara kuantitatif akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan.

Malthus membeberkan sejumlah factor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan riilnya juga akan meningkat dengan sepadan. Pertambahan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli real (permintaan efektif) masyarakat secara menyeluruh. Barulah, dalam keadaan demikian maka akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan akan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam teorinya mengenai ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai (theory of underconsumption). (Boediono, 2009)

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Perdagangan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang

dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat.

Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut tejembatani. Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun. Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada

gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (kumulatif). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. (Jhingan, 2010).

Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam “General Theory”-nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model- model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul “Economic Possibilities for Our Grand Children” Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (i) kemampuan kita mengendalikan penduduk; (ii) kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil; (iii) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan mempedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan; dan (iv) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi.

Sejauh menyangkut kekhawatiran akan masa depan kapitalisme, Keynes bersifat optimis Keynes menganggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan daya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan over- produksi umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan. (Jhingan, 2010) Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* pada Maret 1956 berjudul *The Take- Off Into Self-Sustained Growth* pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi

ekonomi setiap negara dapat ditelusuri dari aspek sejarah pertumbuhannya hanya dalam tiga tahap: tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. (Boediono, 2009)

Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi 'less developed', untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi 'more developed' untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern. Dalam hal prakondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap- tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel – variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat unilinear dan universal, serta dianggap bersifat permanen. Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai teori modernisasi. (Kuncoro M. , 2000).

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap:

- a) Masyarakat tradisional (The Traditional Society).
- b) Masyarakat Pra-kondisi Untuk Periode Lepas Landas (The Preconditions for Take Off).

- c) Proses Lepas landas (The Take Off).
- d) Gerak Menuju Kedewasaan (Maturity).
- e) Tingkat Konsumsi Tinggi (High Mass Consumption)

2. Harrod – Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh RoyHarrod (1984) di Inggris dan Evsey D. F Domar (1957) di Amerika Serikat Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod- Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). (Boediono, 2009)

Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

- a) Perkonomian bersifat tertutup.
- b) Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan.
- c) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale).
- d) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (steady growth) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengantingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (Capital Output Ratio/COR) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y= C + I$). Atas dasar

asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

$$g = K = n \dots\dots\dots(2-1)$$

Dimana : g = Growth (tingkat pertumbuhan output)

K = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

C. Pendapatan Nasional

Kemampuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, terlihat dari perkembangan produk domestik Bruttonya atau produk nasional bruttonya, atau besaran pendapatan nasionalnya. Apabila perkembangan tersebut memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut memiliki prestasi ekonomi yang cukup baik, walaupun untuk menilai prestasi ekonomi suatu bangsa.

Penilaian terhadap GNP ini dilakukan dari waktu ke waktu yakni setiap tahun, bahkan biasanya dibandingkan dengan negara lain terutama negara yang berada dalam level kondisi ekonomi yang relatif sama. Perhitungan pendapatan nasional yang menghitung nilai produk barang dan juga yang dihasilkan masyarakat dalam suatu perekonomian yang dinyatakan dalam satu tahun tertentu

dan apabila dilakukan setiap tahun secara terus menerus, maka dari penambahan yang terjadi pada setiap tahunnya itu, menunjukkan suatu pertumbuhan yang sering dijadikan pula sebagai ukuran untuk menyatakan laju pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, disatu pihak pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun, sedangkan dilain pihak pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan perubahan tingkat pendapatan yang berlaku dari tahun ke tahun. Produk Nasional Bruto (GNP) adalah nilai Produk nasional (berdasarkan harga pasar) dari jumlah semua barang-barang terakhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam satu tahun termasuk barang-barang konsumsi maupun barang-barang modal, yang meliputi :

1. Barang-barang modal baru yang merupakan tambahan pada jumlah peralatan modal yang sudah ada maupun.
2. Barang-barang yang dimaksud untuk mengganti *sebagian* atau seluruh peralatan barang-barang yang lama.

Setiap tahun dilakukan penyusutan/depresi (depreciation) atas barang-barang modal (gedunggedung, pabrik-pabrik, mesin-mesin dan sebagainya) karena sudah menjadi keharusan untuk mempergunakan pula mesin-mesin yang baru dan modern agar kita tetap dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Kita sudah hams memakai mesin-mesin baru, sekalipun peralatan lama yang ada pada kita mungkin secara teknis masih bisa dipakai untuk beberapa tahun lagi. Barang-barang modal dimaksudkan untuk mengganti (replacement) karena ada penyusutan tadi yang pada hakekatnya tidak menambah kekayaan barang modal kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, penggantian

harus dimasukkan pula dalam nilai produksi barang-barang terakhir dari tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, bagian untuk replacement adalah termasuk dalam pengertian bruto produk nasional bruto atau GNP.

Kondisi di atas akan sangat mempengaruhi GNP, sehingga GNP akan berubah pada setiap tahun. Perubahan-perubahan dalam arti perkembangan GNP dari tahun 2004-2008, sebenarnya apa bila dilihat dari jumlah nilai GNP yang dihasilkan setiap tahun dibanding dengan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki, tentunya dapat dikatakan, bahwa jumlah tersebut belum maksimal. Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum sempat terkelola sumberdaya alamnya dan hal ini tentunya merupakan potensi yang sangat diharapkan dalam membesar pendapatan nasional dimasa yang akan datang.

Indikator yang paling penting dalam mengukur kondisi perekonomian suatu negara dalam periode tertentu adalah Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Secara Makroekonomi dikenal ada 5 (lima) jenis pendapatan suatu negara yaitu :

- G N P (Gross National Product) atau Produk Nasional Bruto
- N N P (Net National Product) atau Produk Nasional Netto
- N I (National Income) atau Pendapatan Nasional
- P I (Personal Income) atau Pendapatan Perorangan Bruto
- D I (Disposable Income) atau Pendapatan Perorangan Netto.

Ditinjau dari besarnya GNP maka setiap negara memiliki GNP yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini dapat dilihat pada besarnya GNP per capita masing-masing Negara. Perbedaan-perbedaan yang

timbul antar satu negara dengan lainnya menurut, Winardi,(1983), adalah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain seperti :

- a) Sumber daya alam yang berbeda
- b) Tingkat pendidikan dan skill serta jumlah penduduk yang berbeda
- c) Adanya persediaan barang-barang modal
- d) Situasi dan kondisi sosial, politik serta keamanan tiap negara.

Namun di lain sisi walaupun GNP suatu negara cukup besar tetapi bila jumlah penduduknya sangat besar maka GNP per kapita negara yang bersangkutan akan menjadi sangat kecil. Jika dikaitkan dengan penapat Winardi tersebut maka kasus seperti yang dialami bangsa Indonesia sekitar tahun 1973-1980-an, GNP Indonesia merupakan GNP terbesar dari negara-negara ASEAN bahkan melebihi beberapa negara di ASIA, namun disatu sisi karena jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar maka GNP per kapita Indonesia tetap berada pada tingkat yang rendah atau lebih kecil dari negara -negara tetangga di ASEAN maupun di ASIA. Menurut Winardi (1983), susunan GNP sangat tergantung pada beberapa faktor, seperti :

1. Struktur Ekonomi

Setiap negara memiliki struktur ekonomi untuk meningkatkan GNP-nya yang masih didasarkan pada berbagai kegiatan ekonomi seperti masih berperannya sektor-sektor tertentu secara lebih dominan misalnya masih berorientasi pada kegiatan sektor pertanian atau pada kegiatan sektor industri atau pada sektor jasa. Namun sering terlihat bahwa banyak negara yang mengkombinasikan struktur ekonomi negaranya dalam meningkatkan GNP.

2. Kebutuhan – Kebutuhan

Suatu perekonomian negara akan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diperuntukkan bagi kepentingan bangsa atau rakyatnya dengan pengecualian bila ada kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Negara yang bersangkutan.

3. Pembentukan Modal

Masa depan suatu bangsa akan sangat bergantung pada apa yang disebut dengan tabungan pemerintah dimana setiap negara akan berusaha meningkatkan tabungan dengan harapan akan memperbesar barang-barang modalnya dimana makin besar tabungan suatu negara maka semakin besar produksi barang modal. Dengan demikian dari beberapa pengertian pendapatan nasional (GNP) maka dapat dirumuskan atau dikatakan bahwa :

- a) Pendapatan Nasional Bruto adalah semua barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan didalam negeri (domestik) ditambah dengan pendapatan netto luar negeri.
- b) Pendapatan Nasional Netto adalah semua produk nasional bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun.

Untuk itu GNP dibagi dalam empat kategori pokok, masing-masing adalah sebagai berikut

- Konsumsi Masyarakat (C)
- Investasi Swasta (I)
- Pengeluaran Pemerintah (G)
- Ekspor Netto (X)

dimana rumus GNP dapat diturunkan sebagai berikut :

$$\mathbf{GNP (Y) = C + I + G + (X - M)}$$

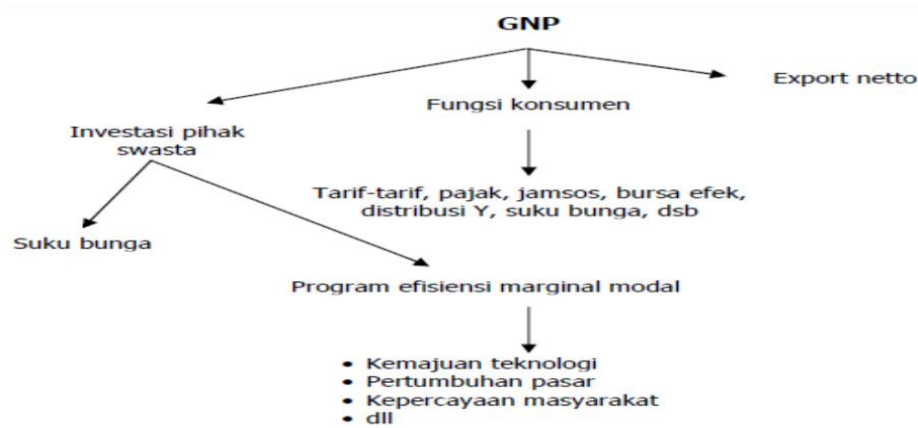
Tingkah laku dan pergerakan keempat komponen inilah yang selalu diperhatikan oleh para ahli ekonomi. Naik turunnya komponen ini akan ikut menentukan naik turunnya pendapatan nasional. Artinya, apabila seluruh komponen itu naik maka naik pula pendapatan Nasional dan sebaliknya apabila seluruh komponen itu turun, akan turun pula pendapatan Nasional. Dengan kata lain, bahwa perubahan-perubahan tersebut akan tergantung pada perimbangan kekuatan masing-masing komponen. Uraian tersebut diatas hanyalah merupakan gambaran dasar, karena tidak semudah itu menentukan tingkat Pendapatan Nasional. Oleh karena itu, pada tingkat yang lebih lanjut akan dikenal lagi apa yang disebut dengan *Aggregate Demand* dan *Aggregate Supply*, di mana Pendapatan Nasional ditentukan oleh interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat.

Oleh karena itu, teori ekonomi makro menganalisis mengenai sampai sejauhmana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa dimana tingkat kegiatan perekonomian ini ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam perekonomian yang meliputi:

- a) Pengeluaran rumah tangga atau Konsumsi rumah tangga,
- b) Pengeluaran pemerintah,
- c) Pengeluaran perusahaan atau Investasi, serta
- d) Ekspor dan Impor. Analisis dalam teori ekonomi makro juga memperhatikan perubahan harga-harga dan pengaruh perubahan jumlah uang beredar terhadap pengeluaran agregat.

Dengan demikian, masalah akan timbul bila pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal. Idealnya, pengeluaran agregat mencapai tingkat yang

diperlukan untuk mewujudkan kesempatan kerja penuh (full employment) tanpa menimbulkan inflasi, meskipun dalam praktiknya tujuan ini sulit dicapai, karena perekonomian tidak dapat secara otomatis mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Tindakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi kedua masalah itu, yaitu melalui serangkaian kebijakan, berupa kebijakan moneter yang memberikan pengaruh terhadap jumlah uang beredar (money supply) dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dan kebijakan fiskal melalui langkah-langkah pemerintah mengubah struktur dan jumlah pajak serta pengeluarannya dengan maksud untuk mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian.



Gambar 2.1 Peran dan Pengaruh GNP Terhadap Aktifitas Perekonomian Suatu Negara

2.2 Pembangunan Ekonomi

Pandangan dari sudut Ekonomi, Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (income per capita) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (gross national income- GNI) per kapita “riil” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering

digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan-seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2011)

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi – institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa ada yang sangat salah dengan pengertian pembangunan yang sempit itu. Kini semakin banyak ekonom dan pembuat kebijakan yang menyuarakan perlunya upaya serius untuk menanggulangi meluasnya kemiskinan absolut, distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, dan meningkatnya pengangguran. Singkatnya, dalam dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisi ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan

kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro dan Smith, 2011:17).

Oleh sebab itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok- kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunan seharusnya upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro dan Smith, 2011:18-19).

Terdapat tiga komponen dasar ataupun nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang sesungguhnya. Tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti pembangunan tersebut ialah (Todaro dan Smith, 2011:25-26):

1) Kecukupan (*sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Semua orang memiliki kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan. Kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupannya ini mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau persediaannya tidak memadai, akan terjadi suatu kondisi “keterbelakangan absolut”.

2) Harga diri (*self-esteem*) : Menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal kedua bagi adanya kehidupan yang baik adalah harga diri, yaitu suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan

orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Denis Goulet, “Pembangunan telah dilegitimasi sebagai tujuan karena merupakan hal yang penting, bahkan mungkin merupakan cara yang sangat berharga untuk meraih harga diri.

3) Kebebasan (*freedom*) : kemampuan untuk memilih. Nilai ketiga dan terakhir yang perlu tercakup dalam makna pembangunan adalah konsep kebebasan manusia. Pengertian kebebasan di sini harus dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif, dan keyakinan dogmatis, khususnya yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan.

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

a). Hukum alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar

kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional.

b). Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c). Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu

syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan 1917. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar. Asumsi teori Ricardo Teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa;

- a) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industry.
- b) Law of diminishing return” berlaku bagi tanah.
- c) Persediaan tanah adalah tetap.

- d) Permintaan akan gandum benar-benar inelastic.
- e) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel.
- f) Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (*given*).
- g) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal.
- h) Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap.
- i) Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja.
- j) Terdapat persaingan yang sempurna.
- k) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan.

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan.” Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. (Jhingan, 2010)

B. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan

proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu

a). Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

b). Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai

posif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai.

Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada system produksi yang ada akan meningkatkan *output* yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk *horizontal*. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

C. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi

capital dan peningkatan sumberdaya manusia (human capital). (Todaro & Smith, 2011)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan structural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011)

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualism ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011).

2.3 Pengeluaran Pemerintah

Konsumsi atau pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoesebroto, 1994).

1. Teori makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. (Suparmoko, 1987) Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono, 1999).

- a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. (Boediono, 1999).

2. Teori Adolf Wagner

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesebroto, 1994).

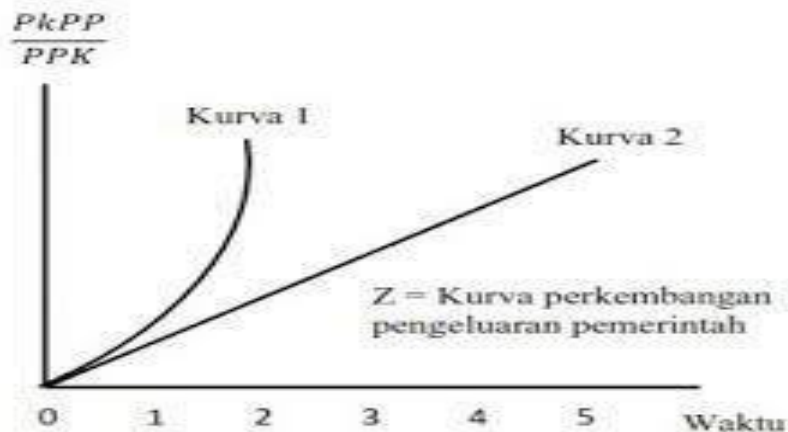
Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkP}{PPk1} < \frac{PkPPn}{PPk2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPkn}$$

Dimana : PPkP: Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK: Pendapatan perkapita (GDP/jumlah penduduk)

1,2,...n : jangka waktu (tahun)



Gambar 2. 2 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Sumber : Mangkoesobroto, 2001

Kurva diatas menunjukkan secara relative peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wager mendasarkan pandanganya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organisasi yang mengagap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

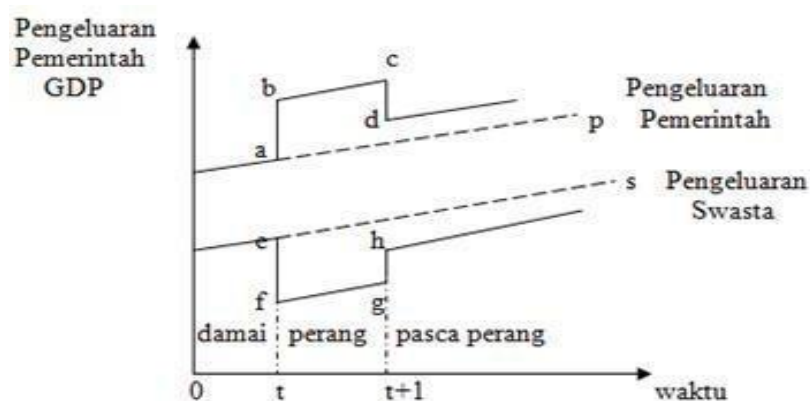
3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta

dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai sematamata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini.



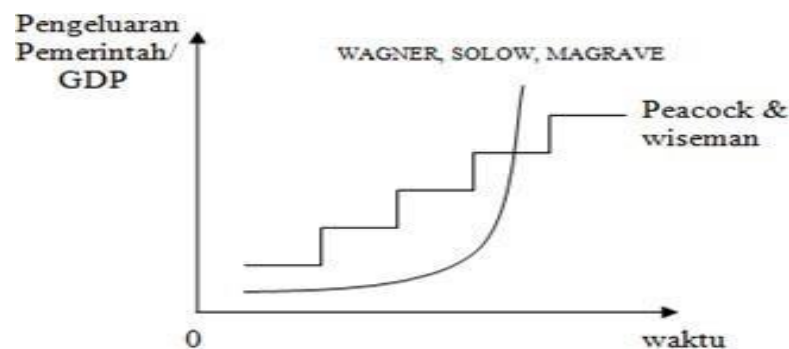
Gambar 2.3 Kurva Peacock dan Wiseman

Sumber : Mangkoesobroto, 2001

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada

tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Gambar 2.4 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave

Sumber : Mangkoesobroto, 2001

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

4. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. (Mangkoedobroto : 2001). Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Penentuan Permintaan

$$U^i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana :

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu,

pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

b. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana :

U_p = fungsi utilitas

S = keuntungan yang diperoleh politisi

G = Vektor barang publik

X = Vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-4)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i \dots \dots \dots (2-5)$$

Dimana :

P = Vektor harga barang swasta

X = Vektor barang swasta

B_i = Basis pajak individu 1

M_i = Total pendapatan individu 1

T = Tarif Pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses , yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price*

Taker) atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

2.4 Kebijakan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kab/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan

memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. (www.kemendes.go.id).

A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing - masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

- 1) Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;

- 2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- 3) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- 4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

- 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;
- 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50%. Capaian *output* paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

B. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

d. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

e. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (www.Kemendesa.go.id).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

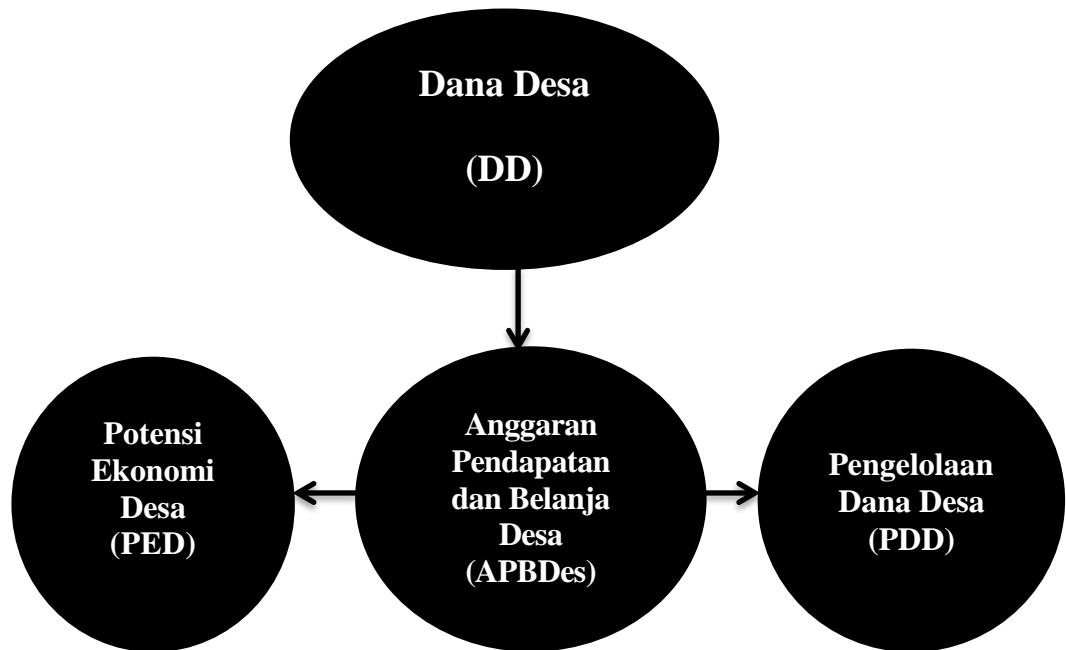
No	Judul Jurnal	Tahun Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
	Penulis				
1.	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Oleh Ni Putu Mulya Resdiyanti, Bandiyah Dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti	2015	Untuk mempelajari dan menggambarkan tentang Implementasi Alokasi Dana Desadalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Muruona kecamatan Ile Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur.	Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.	Hasil analisis menunjukkan masih ada beberapa yang kurang memanfaatkan Alokasi Dana Desa sehingga kurang efektif. Kurangnya pengetahuan tentang pembuatan RPJMaDes oleh perangkat desa sehingga pengimplementasian Dana Desa kurang memenuhi sasaran.
2.	Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh Azwardi Sukanto	2015	Untuk mengkaji penyaluran Alokasi Dana Desa dan keterkaitannya dengan kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan	Analisis dilakukan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis tren (tabel dan grafik).	Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang terkait dengan penyaluran ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Oleh I Wayan Saputra	2016	Mengetahui tingkat efektivitas tingkat pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean serta cara menanggulangi hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa.	Menggunakan metode deskriptif dengan melakukan observasi secara mendalam dengan pihak pemangku kepentingan pemerintahan desa..	Berdasarkan kriteria rasio efektifitas tingkat efektifitasnya mencapai 90-100%. dan mendapati beberapa hambatan pemikiran masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami dan ikut serta dalam pengelolaan alokasi dana desa.
4.	Evaluasi Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi untuk mendukung Kualitas Hidup Masyarakat di Indonesia. Oleh Shihabuddin Fuady Rangkuti	2019	Untuk mengetahui tingkat IPM, Dana Desa, PDRB, Belanja Daerah	Model Ekonomi Panel Data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembentukan IPM, PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM, Belanja Daerah berpengaruh negative namun signifikan terhadap pembentukan IPM

2.6 Tahapan Penelitian

Secara umum, untuk tahapan penelitian ini menganalisis kebijakan Dana Desa terhadap potensi Ekonomi, APBDes dan Infrastruktur Desa.

2.6.1 Kerangka Analisis Penelitian



Gambar 2.5 Kerangka Analisis Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah sebuah cara atau langkah ilmiah untuk mendapatkan sesuatu data atau kebenaran yang dilakukan secara sistematis berdasarkan logika dan fakta.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai settingan sosial atau dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Data yang diteliti adalah Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara penelitian yang dihimpun adalah pada tahun 2016 dan tahun 2020 yang dipublikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes RI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di rencanakan selama 2 bulan yaitu Juni hingga Juli tahun 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data ini berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna untuk penelitian ini.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder yang dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan observasi lapangan, wawancara dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder dan wawancara kepada pemerintahan desa singkuang, tidak lupa juga pengambilan data melalui website-website resmi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), dengan objek penelitian di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

2) Mengentri data yang diperoleh dari berbagai sumber ataupun observasi lapangan guna melihat perkembangan dan pertumbuhan subjek yang diteliti serta melakukan analisis.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dengan dilengkapi diagram dan tabel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Mandailing Natal

a. Letak

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada $0^{\circ}10'-1^{\circ}50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}10'-100^{\circ}10'$ Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal $\pm 6.620,70$ km² atau 9,23 persen dari wilayah Sumatra Utara.

Berdasarkan posisi Geografis, Kabupaten Mandailing Natal memiliki batas-batas wilayah. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Berikut ini Gambar Peta Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2010



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Mandailing Natal

Sumber. BPS Mandailing Natal

b. Luas Wilayah

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan, 27 kelurahan, dan 377 desa dengan luas wilayah mencapai 662,070,00 (Ha) dan jumlah penduduk sekitar 480.911 jiwa (2016) dengan kepadatan penduduk 78 jiwa/km².

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2016**

NO	Kecamatan	Luas Wilayah Total Area (Ha)
1.	Batahan	49.707,30
2.	Batang Natal	65.150,99
3.	Bukit Malintang	6.874,21
4.	Huta Bargot	11.620,97
5.	Kota Nopan	32.514,72
6.	Lembah Sorik Marapi	3.472,57
7.	Lingga Bayu	19.267,50
8.	Muara Batang Gadis	143.502,00
9.	Muara Sipongi	13.570,31
10.	Natal	93.537,00
11.	Naga Juang	5.869,31
12.	Pakantan	9.359,69
13.	Panyabungan	25.977,43
14.	Panyabungan Barat	8.721,83
15.	Panyabungan Selatan	8.759,72
16.	Panyabungan Timur	39.787,40
17.	Panyabungan Utara	6.372,64
18.	Puncak Sorik Marapi	5.553,79
19.	Ranto Baek	15.271,52
20.	Siabu	34.536,48
21.	Sinunukan	17.263,70
22.	Tambangan	15.859,86
23.	Ulu Pungkut	29.519,06
	Mandailing Natal	662.070,00

Sumber. BPS Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal dengan memiliki luas 662.070,00 Ha terdiri dari 23 kecamatan seperti pada tabel diatas. Diantara 23 kecamatan tersebut kecamatan muara batang gadis yang memiliki luas wilayah terbesar dengan jumlah 143,502,00 Ha, diikuti kecamatan natal diposisi kedua yang memiliki luas

wilayah 93,537,00 Ha dan posisi ketiga ditempati oleh kecamatan batang natal dengan luas wilayah sebesar 65.150,99 Ha.

c. Iklim

Kabupaten Mandailing Natal termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Kabupaten Mandailing Natal Suhu udara berkisar antara 23 °C - 32 °C dengan kelembaban antara 80–85%. Curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh iklim, keadaan tofografi, dan perputaran/ pertemuan arus udara.

Oleh karna itu curah hujan beragam menurut bulan dan wilayah tiap kecamatan. Pada tahun 2013 curah hujan maksimum terjadi pada bulan Desember yaitu 3.140 mm dan curah hujan minimum terjadi pada bulan januari berkisar 584 mm. Rata-rata jumlah curah hujan di Kabupataen Mandailing Natal ini adalah 1.654 mm/tahun. Kecamatan Muarasipongi merupakan kecamatan dengan curah hujan tertinggi yaitu 3.022 mm/ tahun sedangkan curah hujan terendah terjadi di kecamatan Panyabungan Utara yaitu 2.172 mm/tahun.

Gugusan Bukit Barisan merupakan sumber mata air sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Mandailing Natal. Ada 6 sungai besar bermuara ke samudra Hindia diantaranya adalah; Batang Gadis 137,5 Km, Siukangaling 46,8 Km, Perlampungan 38,72 Km, Tabuyung 33,46 Km, Batahan 27,91 Km, Kunkun 27,26 Km, dan sungai-sungai lainnya kira-kira 271,15 Km. Keberadaan sungai-sungai itu

membuktikan bahwa daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah daerah yang subur dan menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya.

4.1.2 Perkembangan Wilayah Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal dibentuk Berdasarkan Undang – undang nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten daerah tingkat II Mandailing Natal yang ditetapkan pada tanggal 23 November tahun 1998. Selanjutnya secara formal diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam rangka mensosialisasikan Kabupaten Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal Amru Daulay, SH menetapkan akronim nama Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten Mandailing Natal dalam surat tanggal 24 April 1999 Nomor 100/253.TU/1999. Pada masa awal terbentuknya Mandailing Natal hanya terdapat 8 (delapan) kecamatan yang terbagi menjadi 273 desa. Kecamatan dengan jumlah desanya sebagai berikut ini :

- 1) Kecamatan Batahan dengan jumlah 12 Desa.
- 2) Kecamatan Batang Natal dengan jumlah 40 Desa.
- 3) Kecamatan Kotanopatan dengan jumlah 85 Desa.
- 4) Kecamatan Muara Sipongi dengan jumlah 16 Desa.
- 5) Kecamatan Panyabungan dengan jumlah 61 Desa.
- 6) Kecamatan Natal dengan jumlah 19 Desa.
- 7) Kecamatan Muara Batang Gadis dengan jumlah 10 Desa.
- 8) Kecamatan Siabu dengan jumlah 30 Desa.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya mengeluarkan Perda No.7 tentang pembentukan kecamatan dan Perda no.8 tentang pemekaran desa pada tanggal 29 Juli 2002. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut, maka Kabupaten Mandailing Natal memiliki tujuh belas kecamatan yang terdiri dari 322 desa dan tujuh kelurahan. Kecamatan yang baru terbentuk yaitu :

- 1) Kecamatan Lingga Bayu
- 2) Kecamatan Ulu Pungkut
- 3) Kecamatan Tambangan
- 4) Kecamatan panyabungan Selatan
- 5) Kecamatan Lembah Sorik Marapi
- 6) Kecamatan Panyabungan Barat
- 7) Kecamatan Panyabungan Utara
- 8) Kecamatan Panyabungan Timur
- 9) Kecamatan Bukit Malintang

Kabupaten Mandailing Natal kembali memebentuk kecamatan baru berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2007 yang dikeluarkan pada Tanggal 15 Februari 2007. Kecamatan yang bertambah yaitu :

- 1) Kecamatan Ranto Baek
- 2) Kecamatan Hutabargot
- 3) Kecamatan Puncak Sorik Marapi
- 4) Kecamatan Pakantan
- 5) Kecamatan Sinunukan

Dengan bertambahnya lima kecamatan tersebut, Mandailing Natal memiliki 22 kecamatan yang terdiri dari 349 desa dan 32 kelurahan. Selanjutnya pada tahun yang sama, kembali terbentuk satu kecamatan yang baru yaitu Naga Juang berdasarkan Perda Nomor 45 Tahun 2007 dan 46 Tahun 2007 tentang pemecahan desa dan pembentukan kecamatan yang dikeluarkan pada 7 Desember 2007.

Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan, 353 desa, dan 32 kelurahan serta terdapat sepuluh Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).*www.madina.go.id*

4.1.3 Kondisi Demografi

a. Penyebaran Penduduk

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 Kecamatan dengan kepadatan penduduk sebanyak 62 jiwa//km² dan rata-rata penduduk perdesa sejumlah 1.010 jiwa. Kecamatan Lembah Sorik Marapi merupakan kecemasan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 456 jiwa//km² dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Muara Batang Gadis yakni 11 jiwa/km².

Jumlah penduduk Mandailing Natal pada tahun 2012 adalah 410.931 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 201.686 orang dan perempuan sebanyak 209.245 orang. Dengan demikian sex ratio terhitung sebesar 96,39. Artinya, perbandingan antara penduduk perempuan dengan laki-laki adalah 100 banding 96.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 - 2017

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)										
	Jenis	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
NO	Umur	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	0-4	27 159,00	26 849,00	26 533,00	26 521,00	26 202,00	25 886,00	53 680,00	53 051,00	52 419,00
2	5-9	25 986,00	26 279,00	26 458,00	25 136,00	25 531,00	25 807,00	51 122,00	51 810,00	52 265,00
3	10-14	24 862,00	25 126,00	25 411,00	23 690,00	23 900,00	24 160,00	48 552,00	49 026,00	49 571,00
4	15-19	23 329,00	23 452,00	23 525,00	22 958,00	23 018,00	23 067,00	46 287,00	46 470,00	46 592,00
5	20-24	17 452,00	17 657,00	17 865,00	17 990,00	18 110,00	18 222,00	35 442,00	35 767,00	36 087,00
6	25-29	14 899,00	14 856,00	14 863,00	15 383,00	15 305,00	15 299,00	30 282,00	30 161,00	30 162,00
7	30-34	13 339,00	13 387,00	13 405,00	14 391,00	14 442,00	14 433,00	27 730,00	27 829,00	27 838,00
8	35-39	12 891,00	12 973,00	13 057,00	13 746,00	13 863,00	13 989,00	26 637,00	26 836,00	27 046,00
9	40-44	11 379,00	11 543,00	11 685,00	12 418,00	12 572,00	12 708,00	23 797,00	24 115,00	24 393,00
10	45-49	10 950,00	11 148,00	11 335,00	12 141,00	12 333,00	12 517,00	23 091,00	23 481,00	23 852,00
11	50-54	9 678,00	9 871,00	10 071,00	10 536,00	10 768,00	10 997,00	20 214,00	20 639,00	21 068,00
12	55-59	7 582,00	7 849,00	8 074,00	8 128,00	8 488,00	8 796,00	15 710,00	16 337,00	16 870,00
13	60-64	5 386,00	5 752,00	6 104,00	6 039,00	6 416,00	6 830,00	11 425,00	12 168,00	12 934,00
14	65+	6 614,00	6 940,00	7 318,00	10 311,00	10 673,00	11 090,00	16 925,00	17 613,00	18 408,00
Jumlah		211 506,00	213 682,0 0	215 704,00	219 388,00	221 621,00	223 801,00	430 894,00	435 303,00	439 505,00

Sumber. BPS Mandailing Natal

Pada tabel 4.2 diatas dapat kita lihat pertumbuhan penduduk menurut usia dari 0 sampai 65 tahun keatas, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang meningkat dari kalangan jenis kelamin laki- laki mulai dari tahun 2015 dengan jumlah 211.506,00 orang, lanjut pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 213.682,00 orang, dan terakhir tahun 2017 mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 215 704,00 dengan jumlah rata- rata pertumbuhan penduduk tiga tahun terakhir ini kurang lebih sebesar 2000 orang jiwa pertahun. Tidak jauh berbedah dikalangan jenis kelamin perempuan pun begitu meningkat pertumbuhan penduduk nya dalam tiga tahun terakhir ini dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu rata- rata kurang lebih sebesar 3000 orang jiwa pertahun.

b. Tenaga Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Mandailing Natal pada Tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Mandailing Natal pada tahun 2020 mencapai 206.000 orang atau berkurang sekitar 13.704 orang bila dibanding dengan kondisi tahun 2019, yaitu sebesar 219.704 orang. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Mandailing Natal kondisi tahun 2020 mencapai 192.603 orang atau berkurang sekitar 13.146 orang dibanding tahun 2019, yaitu sebesar 205.749 orang. Jumlah pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal juga sedikit mengalami penurunan dari 13.955 orang pada tahun 2019 menjadi 13.397 orang pada tahun 2020.

Sementara itu, selama periode tahun 2019 - 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Mandailing Natal mengalami penurunan dari 71,16

persen pada tahun 2019 menjadi 65,94 persen pada tahun 2020. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dari 6,37 persen pada tahun 2019 menjadi 6,50 persen pada tahun 2020.

Tabel 4.3 Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2019 – 2020

NO	Kegiatan Utama	Satuan	2019	2020	Selisih
1	Angkatan Kerja	Orang	219 704	206 000	-13 704
-	Bekerja	Orang	205 749	192 603	-13 146
-	Pengangguran	Orang	13 955	13 397	-558
2	Bukan Angkatan Kerja	Orang	88 201	106 387	18 186
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,16	65,94	-5,22
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,37	6,50	-0,13

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2019, dan Agustus 2020

Pada Data yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa Angkatan Tenaga Kerja Mandailing Natal mengalami penurunan yang signifikan mulai dari tahun 2019 angkatan kerja sebesar 219.704 orang pada tahun berikutnya 2020 sebesar 206.000 jumlah penurunan ini sebesar -13.704 angka ini mungkin bisa dikatakan angka tertinggi untuk penurunan angkatan kerja disuatu kabupaten atau kota. Dalam angkatan kerja ini dibagi oleh dua turunan yaitu sektor bekerja dan pengangguran tidak jahu berbedah dengan angkatan kerja yang sama- sama mengalami penurunan di sector bekarja dalam dua tahun ini sebesar -13.146 dan pengangguran sebesar -558. Begitu juga dalam kategori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar -5,22 dan Tingkatan Pengangguran Terbukan (TPT) sebesar -0,13 yang sama- sama mengalami penurunan yang signifikan.

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,94 persen, sedangkan tahun 2019 masih tumbuh sebesar 5,30 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal mengalami perubahan pola pertumbuhan yang searah dengan Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal mengalami pertumbuhan yang melambat secara umum sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Mandailing Natal yaitu 6,18 persen dan terus mengalami perlambatan hingga pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,94 akibat dampak covid-19. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara juga mengalami kontraksi tahun 2020 mencapai 1,07 persen.

Tabel. 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Mandailing Natal tahun 2018- 2020

Laju pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 (Persen)			
Kategori	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,16	5,34	0,62
B. Pertambangan dan Penggalian	6,01	6,25	-1,28
C. Industri Pengolahan	6,21	5,06	-3,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4	3,35	3,47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,96	3,1	-0,58
F. Konstruksi	5,9	6	-5,47
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,25	7,06	-1,92
H. Transportasi dan Pergudangan	4,84	4,32	-6,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,29	5,79	-6,79
J. Informasi dan Komunikasi	1,71	4,1	2,64
K. Jasa Keuangan dan Asurans	1,32	2,51	0,69
L. Real Estat	4,52	3,34	3,79
M N. Jasa Perusahaan	3,58	3,42	-2,86
O. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,34	3,52	-0,48
P. Jasa Pendidikan	5,42	2,28	4,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,68	2,34	3,8
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,5	4,68	-1,9
Produk Bruto Daerah Domestik	5,79	5,3	-0,94

Sumber. BPS Mandailing Natal

Pada masa Pandemi Covid19 ini hampir semua daerah di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan Produksi Domestic Regional Bruto (PDRB) tidak terkecuali di kabupaten mandailing natal yang sangat mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Seperti data diatas dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 sampai pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, pada tahun 2020 ini yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil ada pada sector jasa pendidikan sebesar 4,31 persen, disusul oleh sector jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan sebesar 3,8 persen dan sector real estat sebesar 3, 79 persen, ini beberapa sector yang menyumbang pertumbuhan ekonomi dimasa krisis ini. Berikut ini pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dari tahun dari tiga tahun terakhir ini dimulai dari tahun 2018 sebesar 5,79 persen ditahun 2019 sebesar 5, 3 persen dan tahun terakhir 2020 sebesar -0,94 ini artinya pertumbuhan ekonomi kabupaten mandailing natal mengalami krisis besar di daerah tersebut.

4.1.5 Keadaan Sosial

a. Tingkat Pendidikan

Kabupaten Mandailing Natal secara administrasi Tingkat Pendidikan tercatat dengan jumlah 621 sekolah dari beberapa tingkat sekolah seperti sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejurusan (SMK) tingkat pendidikan sekolah ini tergabung dalam kategori negeri dan swasta. Tingkat pendidikan kabupaten mandailing natal masih dikatakan dalam ketegori belum maju

jika dibandingkan dengan di beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Terdapat 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, rata-rata tingkat pendidikan di kecamatan masih dalam hitungan jari baik itu tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dalam kategori negeri ataupun swasta. Beberapa sekolah yang ada di Mandailing Natal ini tidak serta merta sampai ke desa-desa untuk bangunan tingkat sekolah SMP, SMA maupun SMK melainkan hanya di pusat kecamatan itu sendiri.

Tabel. 4.5 Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

No	KECAMATAN	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	395	20	415	83	45	128	26	30	56	12	10	22	621
1	Kec. Batahan	19	1	20	5	2	7	1	2	3	0	0	0	30
2	Kec. Batang Natal	31	0	31	6	2	8	2	1	3	1	0	1	43
3	Kec. Kotanopan	36	0	36	9	5	14	1	4	5	2	0	2	57
4	Kec. Muara Sipongi	14	0	14	4	1	5	1	1	2	0	0	0	21
5	Kec. Panyabungan Kota	42	7	49	8	5	13	4	5	9	3	4	7	78
6	Kec. Natal	25	2	27	8	4	12	2	0	2	1	0	1	42
7	Kec. Muara Batang Gadis	16	0	16	6	2	8	2	0	2	1	0	1	27
8	Kec. Siabu	40	4	44	8	8	16	3	4	7	1	4	5	72

9	Kec. Panyabungan Utara	13	2	15	1	3	4	1	3	4	0	0	0	23
10	Kec. Panyabungan Barat	10	0	10	1	1	2	0	0	0	0	0	0	12
11	Kec. Panyabungan Timur	11	0	11	2	1	3	1	1	2	0	0	0	16
12	Kec. Panyabungan Selatan	11	0	11	1	0	1	1	0	1	0	0	0	13
13	Kec. Bukit Malintang	10	3	13	1	3	4	0	1	1	0	1	1	19
14	Kec. Lembah Sorik Merapi	11	0	11	1	1	2	0	2	2	1	0	1	16
15	Kec. Ulu Pungkut	11	0	11	2	1	3	0	1	1	1	0	1	16
16	Kec. Tambangan	14	0	14	2	1	3	1	1	2	0	0	0	19
17	Kec. Lingga Bayu	24	0	24	5	1	6	2	1	3	0	0	0	33
18	Kec. Ranto Baik	13	0	13	3	1	4	1	1	2	0	0	0	19
19	Kec. Puncak Sorik Merapi	9	0	9	1	2	3	0	1	1	0	0	0	13
20	Kec. Sinunukan	19	0	19	6	1	7	1	1	2	1	1	2	30
21	Kec. Huta Bargot	6	1	7	1	0	1	1	0	1	0	0	0	9
22	Kec. Pakantan	5	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6
23	Kec. Naga Juang	5	0	5	1	0	1	1	0	1	0	0	0	7

Sumber. BPS Mandailing Natal

Dari 23 kecamatan yang ada di kabupaten Mandailing Natal ini, tercatat dengan jumlah 621 tingkat sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK baik itu dalam kategori sekolah negeri dan swasta seperti pada tabel diatas. Dalam hal ini tingkat sekolah yang paling banyak ada di kecamatan panyabungan kota yaitu pusatnya kabupaten mandailing natal selanjutnya kecamatan yang banyak

menyumbang tingkat sekolah ada pada kecamatan siabu yang dikenal dengan banyaknya penduduk didaerah ini dan diposisi ke tiga ada kecamatan kotanopatan dengan jumlah 57 tingkat sekolah.

b. Tingkat Kesehatan

Dalam kehidupan manusia yang fundamental yaitu kesehatan tidak terkecuali terkhusus di daerah kabupaten mandailing natal. Hal ini menyangkut pada tenaga kesehatan yang ada di daerah ini, tenaga kesehatan di mandailing natal tidak jauh berbeda dengan tingkat pendidikannya sama- sama belum maju karena melihat masih sedikitnya tenaga kesehatan di mandailing natal. Pada dua tahun terakhir ini tahun 2015 dan tahun 2017 menunjukkan jumlah tenaga kesehatan mandailing natal sebesar 2.122 orang yang tersebar di beberapa kecamatan, jumlah ini bisa dikatakan masih sedikit melihat besarnya teritorial daerah ini apalagi akhir- akhir ini tingginya penyakit atau wabah Covid19 yang melanda Indonesia termasuk mandailing natal. Jumlah tenaga kesehatan sangat diperlukan perannya pada masa sekarang ini untuk menjaga ataupun pemulihan kesehatan masyarakat mandailing natal.

Tabel. 4.6 Jumlah Tenaga Kesehatan di Mandailing Natal

Banyaknya Dokter dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Menurut Keahlian dan Kecamatan (Jiwa)												
Kecamatan	Dokter Umum		Dokter Gigi		Dokter Specialis		Specialists		Perawat +Perawat Pembantu		Para Medis Non Perawat	
	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017
Batahan	2	1	0	0	0	0	13	25	4	-	0	0
Batang Natal	1	2	0	0	0	0	9	35	5	4	0	0
Bukit Malintang	1	2	0	0	0	0	11	13	2	5	0	0
Huta Bargot	0	2	0	1	0	0	8	28	4	13	0	0
Kotanopan	0	2	0	0	0	0	8	42	9	16	0	0
Lembah Sorik Marapi	0	2	0	0	0	0	4	14	2	4	0	0
Lingga Bayu	2	0	0	0	0	0	12	34	8	16	0	0
Muara Batang Gadis	1	1	0	0	0	0	5	21	2	1	0	0
Muara Sipongi	2	1	0	0	0	0	7	23	8	3	0	0
Naga Juang	1	1	1	1	0	0	7	16	1	5	0	0
Natal	6	3	1	0	0	0	60	90	26	46	0	0
Pakantan	1	1	0	1	0	0	3	13	5	7	0	0
Panyabungan Kota	22	27	10	20	22	23	120	167	155	134	0	0
Panyabungan Barat	3	1	0	0	0	0	10	25	5	11	0	0
Panyabungan Selatan	1	1	0	1	0	0	9	17	2	8	0	0
Panyabungan Timur	1	3	0	0	0	0	12	20	3	14	0	0

Panyabungan Utara	2	2	0	1	0	0	13	27	10	24	0	0
Puncak Sorik Marapi	0	2	1	1	0	0	9	35	5	6	0	0
Ranto Baek	1	3	0	0	0	0	8	20	5	14	0	0
Siabu	2	7	2	1	0	0	31	70	27	54	0	0
Sinunukan	2	2	1	1	0	0	11	26	6	6	0	0
Tambangan	1	2	0	0	0	0	9	15	3	10	0	0
Ulu Pungkut	1	1	0	0	0	0	6	16	2	1	0	0
Mandailing Natal	53	69	16	28	26	23	385	792	299	411	0	0

Sumber. BPS Mandailing Natal

Pada tabel 4.7 menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di kabupaten mandailing natal dalam tiga tahun terakhir ini dimulai dari tahun 2015, 2016, dan 2017 dengan jumlah sebesar 2.122 orang tenaga kesehatan mengacu dari sumber BPS Mandailing Natal. Dari sekian banyaknya tenaga kesehatan yang paling terbanyak tenaga kesehatannya ada pada kecamatan panyabungan kota dengan jumlah 700 orang tenaga kesehatan berbagai keahlian yang tergabung selanjut disusul oleh kecamatan natal dengan jumlah 232 orang, dan ke tiga kecamatan dengan jumlah 194 orang.

4.2 Kondisi Geografi Kecamatan Muara Batang Gadis

Kecamatan Muara Batang Gadis adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Muara Batang Gadis menempati area seluas 143.502,00 (Ha) yang terdiri dari 14 desa. Wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Natal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kecamatan Siabu, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dari 14 desa yang terdapat di Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa yang memiliki luas adalah Desa Singkuang II dengan luas 23,229,62 (Ha) dan terkecil luas wilayah adalah Desa Pananggulan dengan luas 4,073,56 (Ha). Berikut ini gambar peta Kecamatan Muara Batang Gadis.



Gambar. 4.2 Peta Kecamatan Muara Batang Gadis

Sumber. BPS Mandailing Natal

Kecamatan Muara Batang Gadis yang terdiri dari 14 desa diantaranya yaitu Desa Singkuang I, Singkuang II, Tabuyung, Sikapas, Batu Mundam, Rantau Panjang, Lubuk Kapundung, Lubuk Kapundung II, Huta Imbaru, Panunggulan, Tagilang Julu, Sale Baru, dan Suka Ramai. Secara geografis desa- desa di Kecamatan Muara Batang ini terbagi dari beberapa bentuk diantaranya daerah dataran, pantai, lereng atau pengkung bukit, dan lembah atau aliran sungai.

4.2.1 Luas Wilayah

Berikut ini adalah data luas wilayah desa- desa yang ada di Kecamatan Muara Batang Gadis yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistic (BPS) Mandailing Natal tahun 2019.

Tabel 4.7 Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Luas Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Rasio Terhadap Luas Kecamatan (%)
1.	Rantau Panjang	21 158,32	14,01
2.	Manuncang	12 670,91	8,39
3.	Lubuk Kapundung	5 536,33	3,67
4.	Huta Imbaru	15 794,50	10,45
5.	Panunggulan	4 073,56	2,69
6.	Tabuyung	13 256,66	13,79
7.	Singkuang II	23 229,62	15,38
8.	Singkuang I	11 754,51	7,78
9.	Sikapas	16 852,43	11,15
10.	Batu Mundam	12 468,58	8,25
11.	Tagilang Julu	6 706,58	4,44
12.	Sale Baru	-	-
13.	Suka Ramai	-	-
14.	Lubuk Kapundung II	-	-

	Kec. Muara Batang Gadi	143 502,00	100.00
--	-------------------------------	-------------------	---------------

Sumber: BPS Mandailing Natal

Pada data tabel 4.9 menunjukkan luas wilayah di 14 Desa Kecamatan Muara Batang Gadis. Terdapat desa yang terluas itu adalah desa Singkuang II dengan luas wilayah sebesar 23 229,62 (Ha) dan disusul oleh desa Rantau Panjang dengan luas wilayah sebesar 21 158,32 (Ha) dan ketiga desa Sikapas dengan luas wilayah sebesar 16 852,43 (Ha). Dalam hal ini tidak lupa juga saya menjelaskan bahwasannya ada tiga desa yang tidak dicantumkan dalam tabel 4.9 dengan luas wilayah dikarenakan data tiga desa tersebut masuk dalam data luas wilayah desa induk maka dari itu tidak dicantumkan jumlah luas wilayah ketiga desa itu pada tabel tersebut.

4.2.2 Tingkat Kependudukan

Berikut ini adalah data tingkat kependudukan desa- desa yang ada di Kecamatan Muara Batang Gadis di 14 desa tersebut. Data ini yang dirilis atau dipublikasi oleh Badan Pusat Statistic (BPS) Mandailing Natal pada laporan tahunan yang bertepatan pada tahun 2020 dengan data tahun 2019.

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa Tahun 2019

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Rantau Panjang	1.500	7
2.	Manuncang	734	6
3.	Lubuk Kapundung	828	1
4.	Huta Imbaru	895	6

5.	Panunggulan	606	1
6.	Tabuyung	3.469	26
7.	Singkuang II	1.454	6
8.	Singkuang I	1.327	1
9.	Sikapas	1 107	6
10.	Batu Mundam	1.350	1
11.	Tagilang Julu	574	9
12.	Sale Baru	1.129	-
13.	Suka Ramai	509	-
14.	Lubuk Kapundung II	740	-
	Kec. Muara Batang Gadis	17 049	12

Sumber: BPS Mandailing Natal

Dalam hal ini data tingkat jumlah penduduk di 14 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis dengan jumlah sebesar 17.049 orang, pada tahun 2019 menunjukkan Desa Tabuyung adalah desa yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dengan jumlah sebesar 3.469 orang jika dibandingkan dengan desa- desa lain, diposisi selanjutnya terdapat Desa Rantau Panjang dengan jumlah tertinggi ke dua dengan sebesar 1.500 orang dan tiga besar tertinggi ada pada Desa Singkuang II dengan jumlah penduduk sebesar 1.454 orang. Terakhir saya juga menjelaskan pada data ini dengan desa tingkat jumlah penduduk terendah adalah Desa Suka Ramai dengan jumlah penduduk sebesar 509 orang seperti pada data diatas.

4.2.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan di Kecamatan Muara Batang Gadis adalah hal yang paling fundamental yang harus dikaji secara teori maupun data fakta dimulai dari tingkat sumber daya manusia dan juga infrastruktur bangunan sekolah. Terdapat pada tabel 4.11 ini adalah data jumlah tingkat pendidikan banyaknya sekolah

seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kujurusan (SMK) di Kecamatan Muara Batang Gadis di empat belas desa tersebut.

Tabel 4.9 Banyaknya Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Menurut Desa/Kelurahan Tahun Ajaran 2019/2020

No	Desa/Kelurahan	SD Negeri/Swasta		SMP Negeri/Swasta		SMA Negeri/Swasta		SMK Negeri/Swasta	
		N	S	N	S	N	S	N	S
1.	Rantau Panjang	1	-	1	-	-	-	-	-
2.	Manuncang	1	-	1	-	-	-	-	-
3.	Lubuk Kapundung	1	-	-	-	1	-	-	-
4.	Huta Imbaru	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	Panunggulan	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tabuyung	2	-	1	-	-	-	1	-
7.	Singkuang II	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	Singkuang I	1	-	1	1	1	-	-	-
9.	Sikapas	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	Batu Mundam	1	-	1	-	-	-	-	-
11.	Tagilang Julu	1	-	-	-	-	-	-	-
12.	Sale Baru	1	-	1	-	-	-	-	-
13.	Suka Ramai	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	Lubuk Kapundung II	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kec. Muara Batang Gadis	15	0	6	1	2	0	1	0

Sumber: BPS Mandailing Natal

Berikut ini adalah jumlah banyaknya sekolah yang ada di Kecamatan Muara Btang Gadis terdapat di empat belas desa tersebut dengan total jumlah 25 sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kujurusan (SMK) baik itu dalam kategori sekolah negeri maupun swasta. Pada empat belas desa tersebut terdapat desa Singkuang I dan Tabuyung sebagai desa dengan jumlah banyaknya sekolah

masing 4 sekolah yang ada pada desa itu, disusul oleh Desa Rantau Panjang, Manuncang, Lubuk Kapundung, Batu Mundam dan Sale Baruh dengan jumlah 2 sekolah pada masing- masing desa.

4.2.4 Tingkat Perekonomian

Kemakmuran atau kesejahteraan suatu daerah tersebut dapat dilihat dari parameter perputaran perekonomian suatu daerah itu sendiri. Pada 14 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis ini berikut ini menunjukkan banyaknya unit usaha perdagangan berbagai jenis usaha yang ada didesa tersebut.

Tabel 4.10 Banyaknya Unit Usaha/Perusahaan Perdagangan Menurut Jenis Usaha dan Desa/Kelurahan Tahun 2019

No	Desa/Kelurahan	Toko	Salon	Makan	Kedai Kopi	Hotel/Penginapan
1.	Rantau Panjang	-	-	-	5	-
2.	Manuncang	-	-	-	6	-
3.	Lubuk Kapundung	-	-	-	5	-
4.	Huta Imbaru	-	-	-	7	-
5.	Panunggulan	-	-	-	7	-
6.	Tabuyung	8	3	8	15	-
7.	Singkuang II	-	-	1	7	-
8.	Singkuang I	-	-	4	5	1
9.	Sikapas	2	1	4	9	-
10.	Batu Mundam	-	-	1	6	-
11.	Tagilang Julu	-	-	-	5	-
12.	Sale Baru	-	-	1	4	-
13.	Suka Ramai	-	-	-	5	-
14.	Lubuk Kapundung II	-	-	1	4	-
	Kec. Muara Batang Gadis	10	4	20	93	1

Sumber: BPS Mandailing Natal

Pada Tabel 4.10 di atas menunjukkan berbagai macam jenis usaha perdagangan masyarakat desa di Kecamatan Muara Batang Gadis diantaranya toko, salon, makan, kedai kopi dan hotel atau penginapan dengan jumlah keseluruhan 128 usaha perdagangan yang ada di beberapa desa itu sendiri. Jenis usaha perdagangan yang ada di desa- desa tersebut terdapat Desa Tabuyung sebagai desa yang terbanyak dengan jumlah 34 usaha perdagangan dan diikuti oleh Desa Sikapas dengan jumlah 16 dan terakhir Desa Singkuang I dengan jumlah 10 usaha perdagangan.

4.3 Perkembangan potensi ekonomi Desa di wilayah pesisir Kecamatan Muara Batang Gadis (Singkuang I, Singkuang II, dan Sikapas) paska kebijakan dana desa.

Pada umumnya prioritas dana desa yang paling dasar salah satu adalah menunjang atau meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan menggali potensi ekonomi desa melalui program pemerintahan desa dengan ada bantuan dana desa yang dikururkan langsung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini penelitian mencoba untuk melihat perkembangan potensi ekonomi desa di wilayah pesisir Kecamatan Muara Batang Gadis di desa Singkuang I, Singkuang II, dan Sikapas yang terdapat ada lima desa yang secara geografis berada di wilayah pinggiran pantai dengan laut yang luas dan bagus.

Tabel 4.11 Potensi Ekonomi Desa Singkuang I, Singkuang II, dan Sikapas Sebelum dan Setelah Paska Kebijakan Dana Desa

DESA SINGKUANG I, SINGKUANG II DAN SIKAPAS					
Kategori		Keterangan			
➤ Kelautan		➤ Sektor nelayan sebagai, pekerjaan bagi masyarakat desa dalam mencari pendapatan keluarga. ➤ Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Karet, Cokelat, dan Buah-buahan lainnya. Ini potensi ekonomi masyarakat desa dengan jangka panjang untuk pendapatan. ➤ Sektor Perusahaan, Perusahaan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.			
➤ Perkebunan					
➤ Perusahaan Kelapa Sawit					
DESA SINGKUANG I					
No	Tahun Anggaran	Potensi Desa	Jenis	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	2019	BUMDes	Keyboard	Rp. 80.000.000.00	Gagal
DESA SINGKUANG II					
1.	2019	BUMDes	Tambak lele	Rp. 80.000.000.00	Gagal
DESA SIKAPAS					
1.	2019	BUMDes	Sapi	Rp. 80.000.000.00	Gagal
2.	2019	Pasar Desa	Pembangunan Pasar	RP. 265.720.000.00	Berhasil

Sumber: Kantor Pemerintahan Desa

Seperti pada tabel 4.11 di atas yang menampilkan data potensi ekonomi desa di wilayah pesisir kecamatan muara batang gadis di tiga desa yaitu Desa Singkuang I, Singkuang II, dan Sikapas pasca kebijakan dana desa. Pada data di atas yang menunjukkan di tiga desa tersebut gagal dalam menjalankan ataupun mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) padahal secara substansinya Bumdes adalah potensi besar untuk membangun ekonomi desa dalam anggaran dana desa, akan tetapi dari tiga desa tersebut desa sikapas memiliki keunggulan dalam pemanfaatan dana desa dengan pembangunan pasar tradisional ini salah satu bentuk potensi ekonomi desa dan juga untuk Pendapatan Asli Desa (PAD).

Adapun jenis usaha dari Bumdes desa seperti desa singkuang I dengan jenis usaha Bumdes keyboard, desa singkuang II jenis usaha Bumdes tambak ikan lele, desa sikapas jenis usaha Bumdes ternak sapi. Selain data di atas tidak ada lagi potensi yang memang digali ataupun dibangun oleh ketiga desa atau pemerintahan desa tersebut secara jangka panjang maupun menengah dalam hal agenda kebijakan dana desa.

Dilihat secara geografis tiga desa ini berada dipinggir laut yang luas dan bagus jika ini dimanfaatkan ataupun dikelola dengan baik sebagai objek wisata secara kebijakan dana desa tidak menutup kemungkinan ketiga desa ini kedepannya sebagai desa yang maju dengan destinasi wisata yang bagus sebagai potensi ekonomi desa dan juga mendorong pendapatan masyarakat desa.

Tabel 4.12 Anggaran Dana Desa Singkuang I, Singkuang II dan Sikapas Tahun 2019 dan 2020

ANGGARAN DANA DESA SINGKUANG I TAHUN 2019			ANGGARAN DANA DESA SINGKUANG I TAHUN 2020		
1.	PENDAPATAN Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua - Tahap Ketiga	Rp. 812.050.000.00 Rp. 304.510.000.00 Rp. 298.890.000.00 Rp. 208.650.000.00	PENDAPATAN Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua - Tahap Ketiga	Rp. 879.540.000.00 Rp. 327.090.000.00 Rp. 305.960.000.00 Rp. 246.490.000.00	
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA ➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ➤ Bidang Pembangunan Desa ➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat ➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ➤ Bidang Tak Terduga	Rp. 301.790.000.00 Rp. 289.050.000.00 Rp. 135.480.000.00 Rp. 79.850.000.00 Rp. 5.880.000.00	BELANJA BANTUAN KE DESA ➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ➤ Bidang Pembangunan Desa ➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat ➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ➤ Bidang Tak Terduga	Rp. 309.820.000.00 Rp. 298.520.000.00 Rp. 206.709.000.00 Rp. 59.870.000.00 Rp. 4.621.000	
3.	JUMLAH BELANJA	Rp. 812.050.000.00	JUMLAH BELANJA	Rp. 879.540.000.00	
ANGGARAN DANA DESA SINGKUANG II TAHUN 2019			ANGGARAN DANA DESA SINGKUANG II TAHUN 2020		

1.	PENDAPATAN Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua - Tahap Ketiga	Rp. 832.940.000.00 Rp. 327.090.000.00 Rp. 305.960.000.00 Rp. 199.890.000.00	PENDAPATAN Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua - Tahap Ketiga	Rp. 956.320.000.00 Rp. 381.709.000.00 Rp. 349.930.000.00 Rp. 224.681.000.00
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA ➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ➤ Bidang Pembangunan Desa ➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat ➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ➤ Bidang Tak Terduga	Rp. 301.970.000.00 Rp. 298.520.000.00 Rp. 165.709.000.00 Rp. 63.990.000.00 Rp. 2.751.000	BELANJA BANTUAN KE DESA ➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ➤ Bidang Pembangunan Desa ➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat ➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ➤ Bidang Tak Terduga	Rp. 309.820.000.00 Rp. 321.040.000.00 Rp. 254.870.000.00 Rp. 68.560.000.00 Rp. 2.030.000.00
3.	JUMLAH BELANJA	Rp. 832.940.000.00	JUMLAH BELANJA	Rp. 956.320.000.00
ANGGARAN DANA DESA SIKAPAS TAHUN 2019			ANGGARAN DANA DESA SIKAPAS TAHUN 2020	
1.	PENDAPATAN Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua - Tahap Ketiga	Rp. 881.530.000.00 Rp. 310.730.000.00 Rp. 302.150.000.00 Rp. 268.650.000.00	PENDAPATAN Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua - Tahap Ketiga	Rp. 960.059.000.00 Rp. 382.065.000.00 Rp. 350.120.000.00 Rp. 227.874.000.00

2.	BELANJA BANTUAN KE DESA		BELANJA BANTUAN KE DESA	
	➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 302.390.000.00	➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 309.820.000.00
	➤ Bidang Pembangunan Desa	Rp. 349.790.000.00	➤ Bidang Pembangunan Desa	Rp. 323.250.000.00
	➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 127.020.000.00	➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 255.105.000.00
	➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 101.080.000.00	➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 70.040.000.00
	➤ Bidang Tak Terduga	Rp. 1.250.000.00	➤ Bidang Tak Terduga	Rp. 1.844.000.00
3.	JUMLAH BELANJA	Rp. 881.530.000.00	JUMLAH BELANJA	Rp. 960.059.000.00

Sumber: Kantor Pemerintahan Desa

Pada tabel 4.12 ini dijelaskan jumlah anggaran dana desa dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan dalam pendapatan anggaran dana desa tiga desa di kecamatan muara batang gadis diantaranya desa singkuang 1, singkuang 2 dan sikapas. Adapun desa singkuang 1 mengalami peningkatan anggaran dana desa tahun 2019 sebesar Rp. 812.050.000.00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 879.540.000.00 jadi peningkatan anggaran dana desa didua tahun tersebut sebesar Rp. 67.490.000.00 Begitu juga desa singkuang 2 yang mengalami peningkatan pendapatan dana desa dengan jumlah anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 832.940.000.00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 956.320.000.00 dengan peningkatan anggaran dana desa singkuang 2 didua tahun itu sebesar Rp. 123.380.000.00 dan terakhir desa sikapas yang mengalami peningkatan anggaran dana desa di tahun 2019 sebesar Rp. 881.530.000.00 dan selanjutnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 960.059.000.00 itu artinya desa sikapas mengalami peningkatan jumlah anggaran dana desa di dua tahun terakhir ini sebesar Rp.78.529.000.00. Dari tiga desa ini yang mengalami peningkatan anggaran dana desa yaitu desa singkuang 2, sikapas dan singkuang 1.

Tabel 4.13 Program Dana Desa Dalam Bentuk Fisik Tahun 2019 dan 2020

SINGKUANG I	Satuan	SINGKUANG II	Satuan	SIKAPAS	Satuan
➤ Jalan Desa	➤ 135 m	➤ Jalan Desa	➤ 109 m	➤ Jalan Desa	➤ 187 m
➤ Keyboard (Bumdes)	➤ 1 Unit	➤ Tambak Lele(Bumdes)	➤ 1 Unit	➤ Lapangan Olahraga	➤ 1 Unit
➤ Lampu Jalan	➤ 9 Buah	➤ Penahan Tanah	➤ 58 m	➤ Alat Tangkap Ikan	➤ 1 Unit
➤ Draniase	➤ 76 M	➤ Alat Tangkap Ikan	➤ 2 Unit	➤ Pembangunan Psr Desa	➤ 1 Unit
➤ Perpustakaan	➤ 1 Unit	➤ Alat Masak (Ember, Gayung dll)	➤ 1 Unit	➤ Penahaan Tanah	➤ 19 m
➤ Lapangan Olahraga	➤ 1 Unit	➤ Mck	➤ 4 Unit	➤ Perpustakaan	➤ 1 Unit
➤ Penahan Tanah	➤ 17 m	➤ Perpustakaan	➤ 1 Unit	➤ Pemeliharaan Sapi (Bumdes)	➤ 1 Unit
➤ Bak Sampah	➤ 4 Unit	➤ Bak Sampah	➤ 4 Unit	➤ Lampu Jalan	➤ 10 Unit
➤ Bibit Sawit	➤ 450 Btg	➤ Lapangan Olahraga	➤ 1 Unit	➤ Bak Sampah	➤ 4 Unit
➤ Alat Tangkap Ikan	➤ 1 Unit	➤ Lampu Jalan	➤ 10 Buah	➤ Gudang Desa	➤ 1 Unit
➤ Alat Masak(Kuali,Gayung dll)	➤ 1 Unit	➤ Pelabuhan Sampan	➤ 1 Unit	➤ Alat Masak (Ember, Kuali dll)	➤ 1 Unit

Sumber: Kantor Pemerintahan Desa

Pada Tabel 4.13 dijelaskan bahwasanya data diatas adalah program kebijakan dana desa dalam bentuk fisik di desa singkuang I, singkuang II, dan sikapas pada tahun 2019 dan 2020. Dari keterangan dalam data ini menunjukkan hampir 45 persen ada persamaan dari sebelas program kebijakan dana desa di tiga desa ini dikarenakan kebutuhan desa hampir sama.

Pada desa singkuang I untuk anggaran dana desa dalam bentuk fisik seperti jalan desa dengan panjang berkisar 135 m yang dulu jalan rusak para dan berlobang sekarang sudah bagus. Untuk Bumdes singkuang I dalam bentuk alat seni yaitu keyboard, desa singkuang I berpandangan untuk memilih Keyboard sebagai Bumdes ini supaya masyarakat desa terbantu ketika acara pernikahan dan memerlukan acara hiburan seperti keyboard ini, keyboard ini juga sebagai jasa rental hiburan bagi desa lain dan menjadi aset pendapatan asli desa. Lampu jalan sangat bermanfaat bagi setiap desa terutama desa singkuang I yang ketika PLN mati lampu jalan anggaran desa ini sebagai penerang bagi masyarakat ketika mau bepergian kesungai, ataupun masjid. Lapangan Olahraga sangat diperlukan setiap desa untuk acara- acara pertandingan keolahragaan. Draniase dibangun untuk menangkal dari banjir yang sebelumnya mengalami banjir setelah ada draniase ini tidak lagi mengalami banjir ketika musim hujan. Perpustakaan desa sebagai objek tempat pembelajaran bagi masyarakat desa. Penahan tana ini dianggarkan supaya tanah masyarakat itu tidak terjadi longsor atau habis begitu saja ke dalam air. Bak Sampah ini program pemerintahan desa mengajak masyarakat desa agar sampah itu tidak dibuang dengan sembarang seperti ke sungai, ketika ada bak sampah sampah tidak berserakan di pinggir sungai. Bibit sawit ini berupah bantuan yang dianggarkan dan diberikan kepada masyarakat

yang mempunyai kebun kelapa sawit dan membutuhkan bibit yang akan ditanam diperkebunan pribadi masyarakat. Alat tangkap ikan sebuah program yang dipermohonkan oleh masyarakat nelayan kepada pemerintahan desa. Begitu juga Alat masak permohonan masyarakat desa supaya desa mempunyai alat masak untuk dipinjamkan kepada masyarakat ketika acara pernikahan dan aqiqahan.

Selanjutnya pada desa singkuang II untuk anggaran dana desa dalam bentuk pisik seperti jalan desa dengan panjang berkisar 109 Meter yang dulu jalan rusak para dan berlobang sekarang sudah bagus. Untuk Bumdes singkuang II dalam bentuk pemeliharaan tambak ikan lele, desa singkuang I berpandangan untuk memilih pemeliharaan tambak ikan lele sebagai Bumdes ini agar desa mempunyai penghasilan secara nilai ekonomi dan hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat ketika penen ikan lele. Untuk anggaran penahan tana desa singkuang II alasanya tidak ubah seperti desa singkuang I agar tanah masyarakat itu tidak terjadi longsor atau habis begitu saja ke dalam air. Alat tangkap ikan ini supaya masyarakat nelayan terbantu secara penapatan hasil tangkapan ikannya. Alat masak ini alasanya sama seperti desa singkuang I. Mck ini dianggarkan atas permintaan masyarakat desa kerana belom semua masyarakat memiliki kamar mandi dan juga WC. Perpustakaan desa ini dianggarkan sebagai tempat pembelajaran masyakat desa. Lapangan Olahraga dibangun sebagai instrument kesehatan keolahragaan bagi pemuda dan orang tua. Lampu jalan sangat bermanfaat bagi setiap desa terutama desa singakuang I yang ketika Pln mati lampu jalan anggaran desa ini sebagai penerang bagi masyarakat ketika mau bepergian kesungai, ataupun masjid. Pelabuhan sampan adalah tempat para nelayan untuk singgah dalam menjual ikan.

Terakhir desa sikapas dalam keterangan untuk program kebijakan dana desa seperti jalan desa yang dibangun untuk kemudahan masyarakat desa dalam akses transportasi dengan panjang sekitar 180 Meter. Pembangunan pasar desa ini sebagai program pembukaan lapangan usaha bagi masyarakat desa yang dulu belum ada dan ini membantuh masyarakat desa dalam akses perdagangan yang juga meningkatkan perekonomian desa. Terkait Bumdes sikapas memilih untuk memelihara sapi dengan berpangan bahwasan memelihara sapi akan begitu cepat dalam perkembangan.

4.4 Pengelolaan dana desa berdasarkan pada peraturan dari pemerintah pusat secara optimal di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina.

4.4.1 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berikut ini data perbandingan peraturan pemerintahan pusat dan pemerintahan desa di kecamatan muara batang gadis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa.

Tabel 4.14 Perbandingan Peraturan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Desa di Kecamatan Muara Batang Gadis Terhadap Asas- Asas Penegelolaan Dana Desa

PERATURAN PEMERINTAHAN PUSAT	PERATURAN YANG DI TERAPKAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
<p>➤ Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.</p>	<p>➤ TidakTranspran, Karena Masyarakat Kecamatan Muara Batang Gadis tidak dapat mengakses informasi tentang keuangan desa dikarenakan tidak keterbukaan pemerintahaan desa, informasi keuangan yg dapat diakses hanya orang tertentu seperti Camat, Seketaris, Bendaraha Camat, Kades, BPD, Pendamping Desa.</p>
<p>➤ Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.</p>	<p>➤ Tidak Akuntabel, Karena tiga desa dalam penelitian ini sama sekali tidak memiliki papan informasi tentang keuangan desa dimasing-masing kantor pemerintahan desa.</p>
<p>➤ Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.</p>	<p>➤ Iya dan Tidak Partisipatif, Karena Masyarakat hanya ikut serta dalam perumusan perencanaan APBDes tetapi jarang sekali ikut serta dalam menjaga pengelolaan keuangan dana desa disebabkan ketidak Transparan dan Akuntabel yang diterapkan oleh pemerintah desa</p>

	terhadap masyarakat.
<p>➤ Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.</p>	<p>➤ Tidak Tertib dan disiplin anggaran, Karena Masyarakat Kecamatan Muara Batang Gadis sama sekali tidak mengetahui berapa program pemerintah desa dalam kebijakan dana desa yang terealisasi maupun tidak terealisasi sesuai praturan.</p>

Sumber: Buku Saku Dana Desa

Pada tabel 4.14 menunjukkan pemerintahan desa singkuang I, singkuang II dan sikap yang berada di kecamatan muara batang gadis tidak melaksanakan peraturan pemerintahan pusat dalam pengelolaan dana desa. Ini menunjukkan kegagalan dari pemerintahan desa terhadap masyarakatnya sendiri dan akan menimbulkan banyak prespektif atau opini dari kalangan masyarakat dan mahasiswa yang mendugah bahwasannya tidak menutup kemungkinan pemerintahan desa, BPD, dan pendamping desa melakukan tindakan korupsi terhadap dana desa secara sistimatis.

4.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Setelah dana desa ditranfer oleh pemerintahan pusat ke rekening desa terlebih dulu pemerintahan pusat memberikan kebijakan untuk praturan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tidak jarang pemerintahan desa melakukan kesalahan atas dari kebijakan praturan yang telah ditetapkan pemerintahan pusat. Berikut ini pada tabel dibawah ini yang menampilkan praturan pemerintahan pemerintahan pusat dan penerapan peraturan pemerintahan desa di kecamatan muara batang gadis dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4.15 Perbandingan Peraturan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Desa di Kecamatan Muara Batang Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PERATURAN PEMERINTAHAN PUSAT	PERATURAN YANG DI TERAPKAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
<p>PERENCANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD. ➤ APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. ➤ APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 	<p>PERENCANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak, Alasannya Fakta dilapangan yang dialami peneliti sama sekali pihak pemerintahan desa tidak pernah menyusun Raperdes semenjak ada kebijakan dana desa untuk penyusunan APBDes. ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya pelaporan APBDes kepada Bupati/Walikota. ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya evaluasi Bupati/Walikota

<p>20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya Muasyawara Desa yg dilakukan Perintahan Desa dan Masyarakat.
<p>PELAKSANAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. ➤ Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes. ➤ Bendahara dpt menyimpan uang dlm Kas Desa & besarnya ditetapkan dgn Perbup/Walikota. ➤ Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn Perbup/Walikota; dan ➤ Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya bukti pengerularan dan penerimaan melalui rekening kas desa. ➤ Iya Alasannya memang benar adanya tidak ada pungutan. ➤ Tidak, Alasannya Bendahara desa tidak mengetahui sama sekali berapa jumlah dana desa atau kas desa. ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya pengadaan barang dan jasa diatus perbup/walikota ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya rincian RAB disahkan oleh Kades.

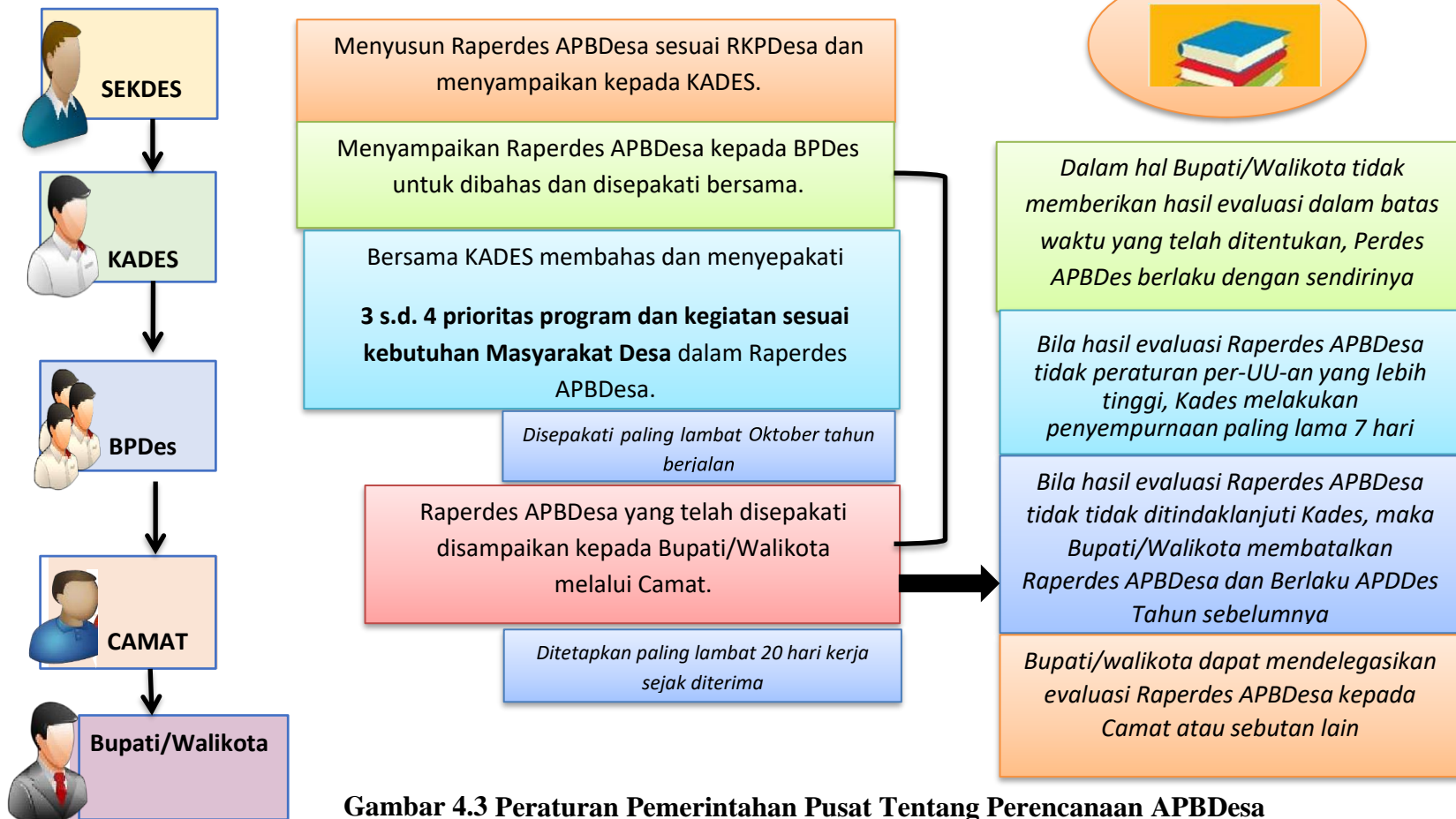
<p>PENATAUSAHAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. ➤ Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. ➤ Melakukan tutup buku setiap akhir bulan. ➤ Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan. ➤ Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades plg lambat tgl 10 bulan berikutnya; dan ➤ Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya pencatatan pengeluaran. ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya laporan penyampaian kpd Kades. ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya
<p>PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun. ➤ Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes; dan ➤ Lampiran Format laporan: <ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawabanrealisasi Pelaks.APBDesa T.A. berkenaan. • Kekayaan Milik Desa per 31 Des. T.A. berkenaan • Program Pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak, Kades tidak pernah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan akhir tahun kepada Bupati/Walikota. ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya ➤ Iya, Alasannya memang benar adanya

Perbandingan antara praturan pemerintahan pusat dengan penerapan praturan pemerintahan desa di kecamatan muara batang gadis ada tiga point yang berbedah diantaranya di bidang perencanaan pada peraturan pusat menyebutkan dibidang itu Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD pada kenyataan penerapan pemerintahan desa tidak membuat rancangan praturan desa tentang APBDesa. Selanjutnya pada point ketiga dibidang pelaksanaan bidang itu menyebutkan dalam praturan pemerintahan pusat yaitu Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan perbup/walikota akan tetapi pada penerapan praturan pemerintahan desa di kecamatan muara batang gadis sama sekali uang kas desa itu disimpan oleh kepala desa itu sendiri secara praturan itu sudah menyalai.

Dipoint ketiga itu ada pada bidang pelaporan dan pertanggungjawaban dalam dalam bidang itu menyebutkan dengan praturan pemerintahan pusat yaitu Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun. Pada kenyataan penerapan praturan pemerintahan desa di kecamatan muara batang gadis yaitu pemerintahan desa hanya meleakukan pelaporan dan pertanggung jawaban hanya satu kali pertahun tepatnya di akhir tahun saja.

4.4.3 Perencanaan APBDesa

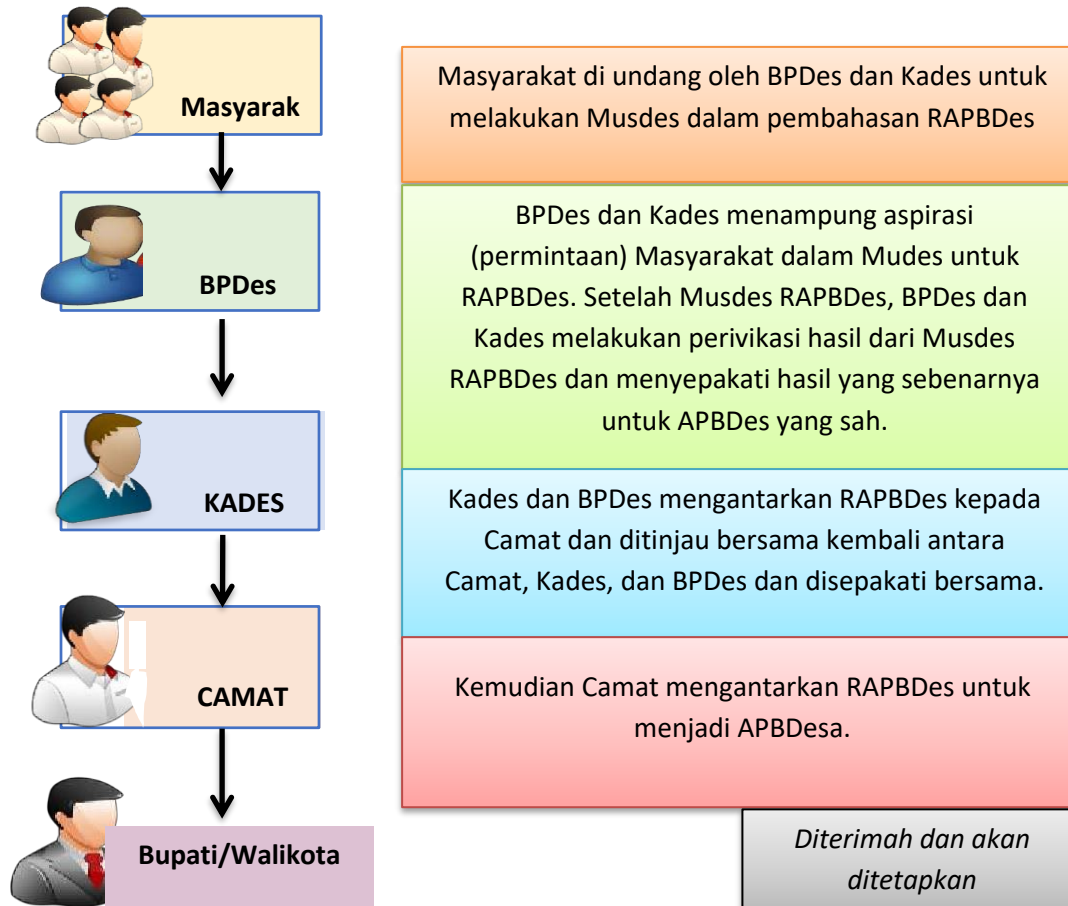
4.4.3.1 Peraturan Pemerintahan Pusat



Gambar 4.3 Peraturan Pemerintahan Pusat Tentang Perencanaan APBDesa

Sumber: Buku Saku Dana Desa

4.4.3.2 Peraturan yang di Terapkan Pemerintahan Desa di Kecamatan Muara Batang Gadis



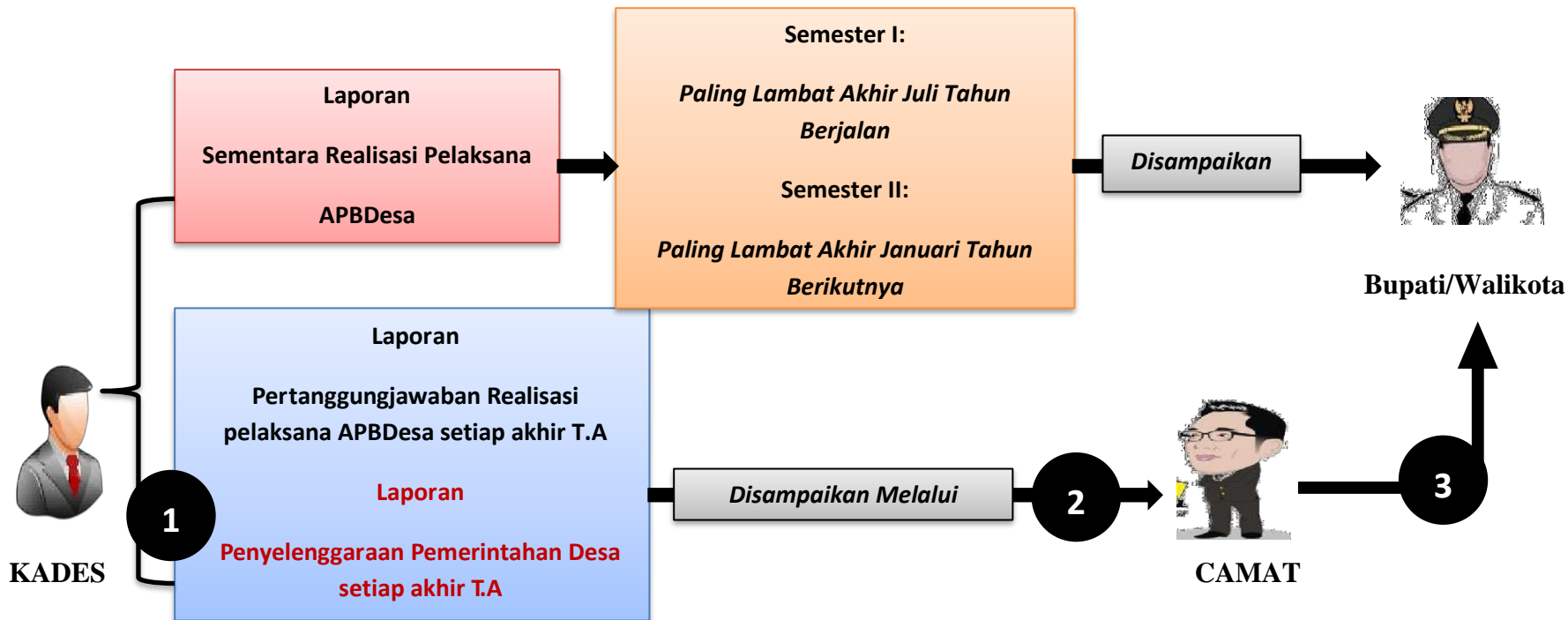
Gambar 4.4 Peraturan Pemerintahan Desa dalam Perencanaan APBDesa di Kecamatan Muara Baatang Gadis

Sumber: Buku Saku Dana Desa

Pada Gambar 4.3 dan 4.4 peneliti menggabungkan untuk keterangan gambarnya tentang perencanaan APBDes menurut peraturan pemerintahan pusat dan penerapan peraturan pemerintahan desa di kecamatan muara batang gadis, dalam hal ini pemerintahan desa dikecamatan muara batang gadis bertolak belakang dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan pusat dalam peraturan perencanaan APBDes. Pemerintahan desa terkhususnya dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPDDes) yang sebagai pembuat praturan di desa dan juga Kepala Desa beserta Seketaris Desa sama sekali tidak ada membuat ataupun menyusun Rancangan Peraturan Desa (Reperdes) dengan ketentuan untuk penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam hal ini cukup disayangkan juga peran dan fungsi Badan Pendampin Desa yang tidak mengarahkan pemerintahan desa untuk melakukan penyusunan regulasi desa. Perbedaan peraturan pusat dan peraturan pemerintahan desa dikecamatan muarah batang gadis ada seperti pada gambar diatas.

4.4.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

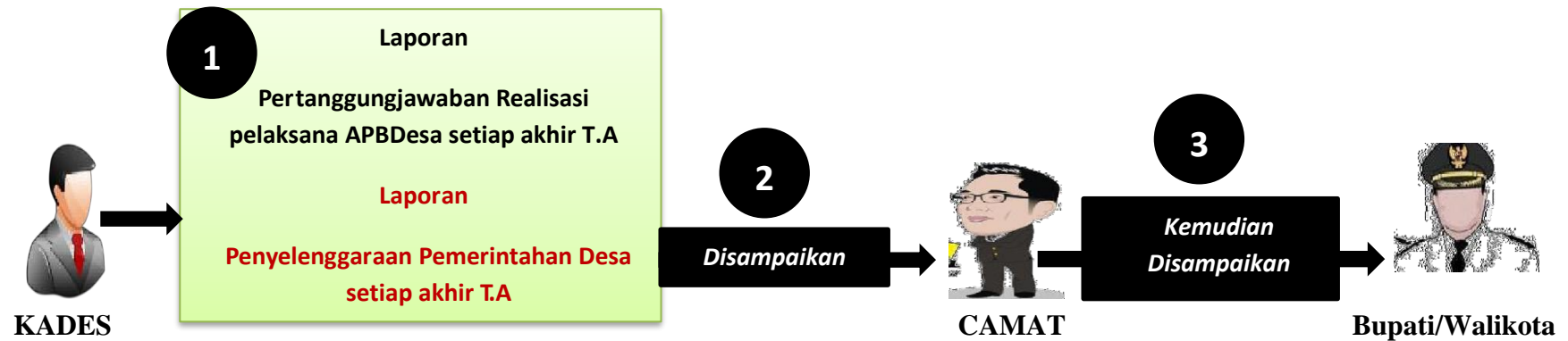
4.4.4.1 Peraturan Pemerintahan Pusat



Gambar. 4.5 Peraturan Pemerintahan Pusat Tentang Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Sumber: Buku Saku Dana Desa

4.4.4.2 Peraturan yang di Terapkan Pemerintahan Desa di Kecamatan Muara Batang Gadis



Gambar 4.6 Peraturan Pemerintahan Desa Tentang Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Sumber: *Buku Saku Dana Desa*

➤ Keterangan Gambar 4.4.4.2 Dalam hal ini bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diterapkan oleh pemerintahan desa berbedah dengan peraturan pemerintahan pusat. Pemerintahan desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes setiap akhir tahun anggaran dan juga laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran, laporan ini hanya sekali selama satu tahun dan itu disampaikan kepala desa kepada camat kemudian disampaikan kepada bupati. Untuk laporan sementara realisasi pelaksana APBDesa semester satu dan dua yang disampaikan kepala desa kepada bupati itu sama sekali tidak pernah diterapkan di pemerintahan desa di kecamatan mauara batang gadis.

➤ Keterangan Gambar 4.4.4.1 Pada Peraturan Pemerintahan Pusat dalam hal laporan dan pertanggungjawaban menunjukkan bahwasannya kepala desa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ini ada dua segmen. Pertama laporan pertanggungjawaban semester 1 bulan juli dan semester 2 dibulan januari tahun berikutnya, laporan itu disampaikan kepala desa kepada bupati. Disegmen kedua laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepala desa kepada camat dan kemudian akan disampaikan kepada bupati.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dari itu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Secara substansi dana desa yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada desa yang dikelola langsung oleh pemerintahan desa untuk membangun desa yang lebih maju secara kualitas hidup masyarakat, ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur. Pengalokasian anggaran dana desa untuk pembangunan ekonomi sudah sebagai program prioritas utama setiap desa yang dianjurkan oleh pemerintahan pusat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menggali potensi ekonomi desa itu sendiri. Pesisir pantai barat kecamatan muara batang gadis tepatnya di desa singkuang I, singkuang II dan sikapas masih gagal dalam kategori pengelolaan BUMDes dan juga gagal membangun potensi ekonomi desa. Jika dilihat dari teritorial geografis ketiga desa ini berada dipinggir laut yang luas dan bagus, ini sangat berpeluang besar dalam pembangunan potensi ekonomi desa yaitu dari sector wisata pantai, jika dana desa itu dianggarkan untuk pembangunan wisata pantai dan dikelola dengan baik tidak menutup kemungkinan ketiga desa ini akan berhasil dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi
2. Pesisir pantai barat di kecamatan muara batang gadis tepatnya desa singkuang I, singkuang II dan sikapas mengalami peningkatan jumlah anggaran dana desa dari tahun 2019 sampai ke tahun 2020. Diantara tiga desa ini tersebut desa

singkuang II sebagai desa dengan peningkatan anggaran terbesar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 123.380.000. kemudian diikuti oleh desa sikapas diposisi kedua dengan peningkatan anggaran sebesar Rp.78.529.000. dan terakhir desa singkuang I dengan peningkatan anggaran sebesar Rp. 67.490.000. Peningkatan anggaran dana desa ini berbanding terbalik dengan peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat yang masih dalam kategori jalan ditempat atau belum ada perubahan besar sama sekali.

3. Melihat berbedanya antara peraturan pemerintahan pusat dengan penerapan peraturan pemerintahan desa di kecamatan muara batang gadis tentang proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari asas- asas keuangan desa (Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tata tertib dan disiplin anggaran), pengelolaan dana desa, perencanaan APBDes, pelaporan dan petanggungjawaban APBDes, dan pendamping desa seperti pada data diatas di Bab IV.
4. Masih minimnya kesadaran Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPDes), dan Pendamping Desa dalam hal mengevaluasi tentang kebijakan untuk program dana desa sebelum dan sesudah. Dengan minim kesadaran ataupun pengetahuan ini yang menyebabkan desa susah untuk menjadi desa yang maju secara kualitas hidup masyarakat, ekonomi, sosial budaya dan politik.

5.2 Saran

1. Milihat besarnya anggaran dana desa dalam satu tahun untuk program kebijakan dana desa ini, pemerintah harus berani dalam mengambil kebijakan yang memang tepat sasaran sebagai prioritas utama untuk kemajuan desa. Prioritas paling utama untuk kebijakan dana desa bagi ketiga desa ini seperti desa singkuang I, singkuang II, dan sikapas yaitu kualitas hidup masyarakat desa, potensi ekonomi, dan sosial dan budaya.
2. Setelah melakukan analisa deskriptif dapat dilihat dengan perbedaan antara peraturan pemerintahan pusat dengan penerapan peraturan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Pemerintahan desa harus memahami peraturan system administrasi dalam pengelolaan dana desa ini agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemerintahan desa dengan masyarakat.
3. Pemerintahan desa harus bertanggungjawab besar atas kebijakan dan pengetahuan dengan mengelola sebuah desa. Maka dari itu pemerintahan desa dan pendamping desa harus sering mengedukasi masyarakat berbagai macam agenda yang berkemajuan untuk meningkatkan nilai kritisnya sesuai yang terdapat pada peraturan pemerintahan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Secara Tahunan dan Kuartal*.
- Data Moneter Internasional (IMF). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Negara Lain pada Kuartal II dan Kuartal III Tahun 2020*.
- KataData.com. Indonesia Corruption Watch (ICW). *Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester 1/2020*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Pintar Dana Desa Tahun 2017*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi UU No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa dan Tujuan Dana Desa*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Rata-Rata Keseluruhan Dana Desa Tahun 2015-2021*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Dana Desa Provinsi Tahun 2018-2020*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Dana Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 -2020*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2020*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Dana Desa Mandailing Natal Tahun 2017-2020*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Dana Desa Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018-2020*.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Kuncoro, Mudrajat. (2014). *Otonomi Daerah, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Erlanga.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Gubernur Edy Rahmayadi 2020. *Tentang Kemajuan Desa diProvinsi Sumatera Utara paska ada Dana Desa*.
- Prof. Simon Kuznets (Michael Todaro). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dalam buku Pembangunan Ekonomi 2011*.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Edisi kedua ed.). Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (Edisi Kesebelas). Jakarta: Erlangga.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 191/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/3/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 8/3/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tapriadi
NPM : 1705180012
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Dampak Pengaruh Dana Desa bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Sumber Daya Manusia
2. Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dalam kebijakan Dana Desa

Rencana Judul : 1. Analisis evaluasi kebijakan dana desa dan potensi ekonomi pesisir dipantai barat Sumatera Utara (studi kasus: Desa Singkuang)
2. Analisis potensi dan pengembangan objek wisata pantai dalam pertumbuhan ekonomi Desa Singkuang
3. Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap pertumbuhan Ekonomi Desa Singkuang

Objek/Lokasi Penelitian : Desa Singkuang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Tapriadi)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 191/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/3/2021

Nama Mahasiswa : Tapriadi
NPM : 1705180012
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan
Tanggal Pengajuan Judul : 8/3/2021
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Dra. Lailan Safina Hasibuan, M.Si
Judul^{**)} : Analisis evaluasi kebijakan dana desa dan potensi ekonomi pesisir dipantai barat Sumatera Utara (studi kasus: Desa Singkuang)

Disahkan oleh
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si)

Medan, 10, Maret 2021.....

Dosen Pembimbing

(Dra. Lailan Safina Hasibuan, M.Si)

Keterangan:

*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan unggahlah lembar ini pada form online: "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : TAPRIADI
N P M : 1705180012
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Proposal : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN POTENSI EKONOMI PESISIR DIPANTAI BARAT TAHUN 2018 (Studi Kasus: Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
05-04-2021	Diskusi tentang judul, format proposal, kisi-kisi bab I, II & III	J L	
21-04-2021	- Perbaiki latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah - Lengkapi dengan data yang relevan dengan latar belakang - Perbaiki penulisan judul tesis	J L	
11-05-2021	- Tambahkan teori pengelompokan dan teori yang sudah ada - Gambarkan kerangka analisis masalah - Perbaiki definisi operasional	J L	
04-06-2021	- Perbaiki kalimat identifikasi masalah - Perbaiki jenis dan sumber data	J L	
09-06-2021	Telah selesai diprint dan acc untuk seminar proposal	J L	

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing Proposal

Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Medan, 07 Juni 2021
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si

Dibuat dengan CamScanner



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : TAPRIADI
N.P.M : 1705180012
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : Jl. AL-FALAH V NO.21 MEDAN
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN POTENSI EKONOMI PESISIR DI PANTAI BARAT (STUDI KASUS KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
04-09-2021	- Perbaiki gambaran umum kampung pemerintahan sesuai koreksi	✓ Ln	
10-09-2021	- Perbaiki analisis tujuan penelitian ke1, tambahkan data nya	✓ Ln	
13-09-2021	- Uraikan lagi lebih jelas penggunaan dana desa - Tambahkan data pendukung	✓ Ln	
15-09-2021	- Beri narasi yang lengkap tentang data2 yg ada.	✓ Ln	
17-09-2021	- Lengkapi abstrak dan daftar pustaka	✓ Ln	
18-09-2021	Selamat telah selesai diperbaiki dan sah untuk ujian skripsi	✓ Ln	

Medan, 18 September 2021
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si